KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa perlu strategi dengan memperhatikan perkembangan lingkungan dan konteks strategis;

b. bahwa Strategi Pertahanan Negara merupakan dasar dalam menentukan kebijakan, pembangunan Postur Pertahanan Negara, pengembangan Doktrin Pertahanan Negara serta pengembangan Strategi Pertahanan Militer dan Strategi Pertahanan Nirmiliter;

c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/22/ M/XII/2007 tentang Strategi Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan lingkungan serta konteks strategis sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Strategi Pertahanan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STRATEGI PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Strategi Pertahanan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Strategi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor : PER/22/M/XII/2007 tentang Strategi Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI
PERTAHANAN NEGARA

EDISI TAHUN 2014

KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

EDISI TAHUN 2014

BUKU STRATEGI PERTAHANAN NEGARA 2014

ISBN 978-979-8878-02-2

Hak Cipta © 2007
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Cetakan Kedua, Juli 2014
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun,
tanpa ijin tertulis dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Diterbitkan oleh :
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Jl Medan Merdeka Barat No 13-14 Jakarta
Telp : (021) 3828055.
Fax : (021) 3810954
Website :www.strahan.kemhan.go.id
Email : doktrinditjakstra@yahoo.co.id

KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa perlu alat dan cara untuk mencapainya;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memperhatikan perkembangan lingkungan dan konteks strategis;

c. bahwa Strategi Pertahanan Negara merupakan dasar dalam menentukan kebijakan, pembangunan Postur Pertahanan Negara, mengembangkan Doktrin Pertahanan Negara serta pengembangan bagi Strategi Pertahanan Militer dan Strategi Pertahanan Nirmiliter;

d. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/22/ M/XII/2007 tentang Strategi Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan dan konteks strategi sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Stategi Pertahanan Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STRATEGI PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Menetapkan Strategi Pertahanan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Strategi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor : PER/22/M/XII/2007 tentang Strategi Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

ds

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

KATA PENGANTAR

Perkembangan lingkungan dan konteks strategis telah dan akan melahirkan hakikat ancaman dan tantangan yang semakin kompleks. Penilaian ada atau tidaknya suatu ancaman didasari oleh kemampuan untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis. Berdasarkan jenisnya ancaman dapat berupa ancaman militer dan ancaman non militer, bila dilihat sumbernya dapat dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan bila berdasarkan aktornya dapat dilakukan oleh negara maupun bukan negara. Kondisi negara tersebut mendorong Kementerian Pertahanan untuk menata konsep pertahanan negara yang lebih *responsive* dan *adaptable* sesuai jenis, sumber dan aktor ancaman. Dinamika perubahan ancaman dan tantangan yang kompleks merupakan pertimbangan utama dalam menyusun strategi pertahanan negara. Dengan demikian diharapkan akan tercapai suatu sistem pertahanan negara yang lebih komprehensif untuk menghadapi tantangan, ancaman dan peluang Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Tugas dan kewajiban pada tararan strategis untuk kepentingan nasional tidak dapat lagi dipikulkan kepada salah satu komponen pertahanan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (1) setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan negara. Kesadaran setiap warga negara untuk ambil bagian dalam bela negara perlu digelorakan ketika negara membutuhkan. Penyusunan strategi untuk mengamankan kepentingan nasional tidak terlepas dari bagaimana pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dielaborasi untuk menjadi kekuatan yang dapat digunakan sesuai hakikat ancaman yang dihadapi. Pengintegrasian pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter merupakan bentuk kesemestaan dalam sistem pertahanan negara.

Pertahanan Negara yang bersifat semesta bagi bangsa Indonesia merupakan model yang dikembangkan sebagai pilihan. Dilihat dari jenis ancaman terhadap pertahanan negara dapat digolongkan dalam ancaman militer dan acaman non militer. Menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama diperkuat komponen cadangan dan komponen pendukung. Menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, dibantu unsur lain kekuatan bangsa.

Penyusunan buku ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman dasar untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran bagi setiap warga negara, serta pedoman kerja bagi aparat pertahanan dan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Tujuannya agar terselenggaranya substansi sasaran strategis yang mencakup Pertama, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer. Kedua, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman non militer. Ketiga, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Keempat, terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri.

Selaku pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, saya menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan petunjukNya, buku Strategi Pertahanan Negara Edisi tahun 2014 dapat diterbitkan sesuai dengan rencana. Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini sebagai salah satu dari produk-produk strategis pertahanan negara. Peran serta tersebut merupakan dharma bakti bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita bangggakan dan cintai bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada seluruh bangsa Indonesia.

Jakarta, 2014

Menteri Pertahanan

Purnomo Yusgiantoro

Paraf :

1. Wamenhan : .....
2. Sekjen : .....
3. Dirjen Strahan : .....

daftar isi

ISI HALAMAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN iii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xiii

1. PENDAHULUAN 2
2. LINGKUNGAN DAN KONTEKS STRATEGIS 7
   2.1 Umum 7
   2.2 Dinamika Lingkungan Keamanan Strategis di Kawasan Asia Pasifik 7
   2.3 Modernisasi Kekuatan Militer 12
   2.4 Isu Perbatasan Antarnegara 17
   2.5 Konflik Intra dan Antarnegara 22
   2.6 Kecenderungan Konflik Kontemporer 23
   2.7 Isu Senjata Pemusnah Massal 25
   2.8 Terorisme 26

2.9 Spionase 28
2.10 Kejahatan Lintas Negara 30
2.11 Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 32
2.12 Perubahan Iklim 34
2.13 Bencana Alam 36
2.14 Keamanan Pangan, Air dan Energi 37
2.15 Epidemi 39
2.16 Perkembangan Lingkungan dan Konteks Strategis Nasional 40

3. KERANGKA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA 46
3.1 Umum 46
3.2 Tujuan Pertahanan Negara dan Sasaran Strategis 48
3.3 Sumber Daya Pertahanan 50
3.3.1 Sumber daya pertahanan militer 53
3.3.2 Sumber daya pertahanan nirmiliter 55
3.4 Cara Mencapai Sasaran Strategis 56
3.4.1 Mempersiapkan pertahanan yang bersifat semesta 56
3.4.2 Mempersiapkan pertahanan defensif aktif 58
3.4.3 Menyusun pertahanan berlapis 59
3.4.3.1 Penangkalan 61
3.4.3.1.1 Instrumen penangkalan 62
3.4.3.1.2 Penangkalan dengan cara penolakan 66
3.4.3.1.3 Penangkalan dengan cara pembalasan 67
3.4.3.2 Menghadapi ancaman militer 67
3.4.3.2.1 Menghadapi ancaman militer agresi 68
3.4.3.2.2 Menghadapi ancaman militer bukan agresi 72
3.4.3.2.3 Tugas bantuan TNI 83

3.4.3.3 Menghadapi ancaman nonmiliter 88
3.4.4 Melaksanakan kerja sama pertahanan dan perdamaian dunia 98
3.4.5 Mengembangkan industri pertahanan untuk mendukung tercapainya kemampuan pertahanan negara 102

4. PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA 105
4.1 Umum 105
4.2 Pokok-Pokok Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara 105
4.2.1 Pembinaan kemampuan pertahanan militer 106
4.2.2 Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter 111

5. PENGELOLAAN Risiko 118
5.1 Umum. 118
5.2 Risiko Operasional 118
5.3 Risiko Ancaman Masa Depan 119
5.4 Risiko Kelembagaan 120
5.5 Risiko Pengelolaan Kekuatan 121

6. PENUTUP 122
6.1 Pemberlakuan 122
6.2 Petunjuk Akhir 122

STRATEGI
PERTAHANAN NEGARA

1. PENDAHULUAN

1.1 Salah satu tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia diperlukan suatu sistem pertahanan negara.

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam usaha untuk mewujudkan suatu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Untuk merealisasikan usaha tersebut, disusun suatu sistem pertahanan semesta sebagaimana diatur dalam diktum pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Usaha pertahanan negara dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Sesuai UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan segenap sumber daya nasional. Setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Hak dan kewajiban warga negara diwujudkan melalui keikutsertaan secara aktif dalam usaha pertahanan negara yang merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada NKRI. Seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi hakikat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap eksistensi NKRI yang ditimbulkan oleh adanya perubahan lingkungan dan konteks strategis.

1.2 Perkembangan lingkungan dan konteks strategis telah menciptakan spektrum ancaman, tantangan dan risiko yang kompleks. Perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman dan tantangan terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman dapat dilihat dari jenis, pelaku (aktor), dan sumber ancaman. Jenis ancaman dan tantangan tidak lagi didominasi oleh ancaman militer, tetapi juga oleh ancaman nonmiliter. Pelaku ancaman tidak terbatas hanya pada aktor negara (*state actor*), tetapi juga aktor non negara (*nonstate actor*), bahkan keduanya dapat bersama-sama menjadi ancaman (*hybrid threat*). Sedangkan bila ditinjau dari sumber ancaman, ada keterkaitan antara ancaman eksternal dan internal.

Dimensi ancaman mudah berkembang dari satu dimensi ke dimensi lain, termasuk dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, informasi dan teknologi. Spektrum ancaman dapat berubah dengan tiba-tiba dari lokal ke nasional. Demikian juga perkembangan eskalasi keadaan dari tertib hingga darurat atau sebaliknya, tidak mudah untuk diprediksi. Sifat, sumber, dimensi, dan spektrum ancaman serta tantangan yang kompleks dan sulit diprediksi, mudah berubah, dan tidak jelas, harus dihadapi dengan suatu kebijakan pertahanan negara yang fleksibel dan adaptif.

1.3 Kebijakan pertahanan negara ditetapkan dalam rangka pengelolaan penggunaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan pertahanan negara. Untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan dan risiko yang disebabkan oleh perkembangan lingkungan dan konteks strategis, diperlukan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara menyebutkan bahwa untuk membangun suatu sistem, pengelolaan, dan penyelenggaraan yang sistematis dengan manajemen dan kepemimpinan yang tepat serta pengawasan yang terus-menerus, diperlukan kebijakan umum pertahanan negara yang terpadu.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini dijabarkan dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara sebagai acuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Kebijakan ini menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara. Implementasi kebijakan penyelenggaraan Pertahanan Negara selanjutnya dirumuskan dalam Strategi Pertahanan Negara.

1.4 Strategi Pertahanan Negara Indonesia dikembangkan berdasarkan kekhasan dan kondisi geografi sebagai negara kepulauan berciri Nusantara, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua, sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional memiliki kerawanan dan tantangan tersendiri. Di samping itu posisi Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara, menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan di kawasan.

Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Pergeseran pola hubungan terhadap suatu negara akan menentukan arah kebijakan yang berpengaruh secara global. Di masa yang akan datang, eksistensi Indonesia akan tetap dipengaruhi oleh kondisi geografisnya dalam tatanan dunia.

Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah yang bernilai strategis bagi negara-negara di berbagai kawasan. Posisi ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Dalam era abad ke-21 ini, perkembangan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, hak asasi, dan lingkungan hidup.

Eksistensi kepentingan negara-negara besar di kawasan ini mendorong terjalinnya hubungan timbal-balik yang erat antara permasalahan dalam negeri dan luar negeri, serta memiliki kepentingan yang bersifat dinamis. Informasi kejadian di dalam negeri dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, negara-negara lain akan memberikan responnya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sebaliknya, informasi kejadian di negara lain, khususnya negara-negara besar dan negara-negara di kawasan ini, dengan cepat mencapai seluruh wilayah dan mempengaruhi kondisi nasional.

1.5 Strategi Pertahanan Negara merupakan dokumen strategis untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun. Produk ini telah disusun dengan merefleksikan hasil kajian strategis tentang sistem pertahanan negara yang telah diselenggarakan pada periode lima tahun sebelumnya, dan perkiraan situasi lima tahun ke depan. Sebagai dokumen strategis, Strategi Pertahanan Negara dijadikan acuan bagi penyusunan Strategi Pertahanan Militer dan Strategi Pertahanan Nirmiliter untuk sekurang-kurangnya lima tahun ke depan. Strategi Pertahanan Negara digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan pembangunan Postur Pertahanan Negara maupun Doktrin Pertahanan Negara.

SUMBER : GOOGLE

874
401
MARINIR
MARINES

2. LINGKUNGAN DAN KONTEKS STRATEGIS

2.1 UMUM

Penyelenggaraan pertahanan negara dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang akan terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Perkembangan lingkungan strategis akan berpengaruh terhadap dinamika ancaman, tantangan, risiko, dan peluang bagi kepentingan nasional. Sementara konteks strategis yang bersifat dinamis akan semakin memperluas bentuk, sumber, sifat, dan dimensi ancaman, tantangan serta risiko.

Esensi dari analisis terhadap perkembangan lingkungan dan konteks strategis menentukan kemungkinan atau perkiraan ancaman, tantangan dan risiko terhadap pertahanan negara. Kemungkinan ancaman, tantangan dan risiko tersebut dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam pemilihan strategi pertahanan negara. Lingkungan strategis juga memberikan peluang bagi kepentingan nasional untuk menjaga tetap tegaknya NKRI dan terjaminnya kelancaran pembangunan nasional.

2.2 DINAMIKA LINGKUNGAN KEAMANAN STRATEGIS DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang sangat dinamis, cepat berubah, dan penuh ketidakpastian. Situasi tersebut berdampak bukan hanya dalam masalah ekonomi, melainkan juga dalam masalah keamanan. Ada sekurang-kurangnya tiga perkembangan yang perlu dicermati dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat berimplikasi pada stabilitas keamanan kawasan, yaitu perkembangan kekuatan militer Tiongkok, perkembangan kebijakan strategis Amerika Serikat di kawasan, dan perkembangan di Laut Tiongkok Selatan (*South China Sea*).

Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan terus memodernisasi militernya. Pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang tinggi menyebabkan Tiongkok memiliki peluang untuk melakukan upaya modernisasi kekuatan dan peningkatan kapasitas militernya. Perkembangan tersebut telah menimbulkan spekulasi dan tanggapan beragam di kalangan negara-negara dalam kawasan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi kecenderungan meningkatnya anggaran belanja pertahanan Tiongkok. Tiongkok menjadi negara yang memiliki anggaran pertahanan terbesar di Asia dan menduduki urutan kedua di dunia meskipun anggaran pertahanannya baru satu perenam anggaran pertahanan AS.

Kekhawatiran atas kemungkinan implikasi perkembangan kekuatan militer Tiongkok pada keseimbangan militer di kawasan sangat beralasan mengingat Tiongkok dinilai cenderung memperlihatkan sikap yang lebih tegas dalam pembangunan kekuatan militer dan politik luar negerinya. Di samping itu, terlihat jelas bahwa Tiongkok sedang terlibat persengketaan kawasan maritim di Laut Tiongkok Selatan dan di Laut Tiongkok Timur. Modernisasi kekuatan militer Tiongkok telah menimbulkan suatu dilema keamanan bagi negara-negara tetangganya.

SUMBER : GOOGLE

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah membangun kekuatan militer secara signifikan. Sebagai implikasi dari perkembangan kekuatan militer Tiongkok yang dianggap memperlihatkan pembangunan postur militer yang aktif dan masif, beberapa negara di kawasan telah melakukan langkah-langkah untuk memodernisasi kekuatan militernya. Alasan yang utama untuk melakukan modernisasi kekuatan militer antara lain adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik bersenjata karena salah perhitungan (*miscalculation*). Pengerahan kekuatan militer di kawasan yang disengketakan telah menciptakan suatu situasi yang kompleks sehingga sangat sulit untuk menjaga keseimbangan kekuatan militer.

Amerika Serikat (AS) telah menerapkan suatu kebijakan strategis yang dinamakan "*US Rebalancing Strategy*". Strategi ini dipicu oleh tiga faktor sebagai berikut: *Pertama*, munculnya kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan penting bagi pertumbuhan perekonomian global yang dapat dimanfaatkan oleh AS untuk pemulihan perekonomiannya. *Kedua,* berakhirnya perang di Irak dan Afghanistan telah memberikan kesempatan bagi AS untuk mengalihkan sumber daya militer, memindahkan pasukan, dan mereorientasikan kebijakan strategisnya. *Ketiga*, modernisasi pertahanan Tiongkok yang telah mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan yang selama ini cenderung didominasi AS.

Implementasi kebijakan *rebalancing strategy* telah mengubah peta kekuatan militer AS di kawasan. *Rebalance* sebenarnya mempunyai elemen diplomasi, ekonomi dan militer, tetapi elemen militer paling banyak menarik perhatian. AS tidak akan mengurangi investasi pertahanannya di Asia Pasifik walaupun ada kecenderungan mengurangi belanja pertahanannya.

SUMBER : GOOGLE

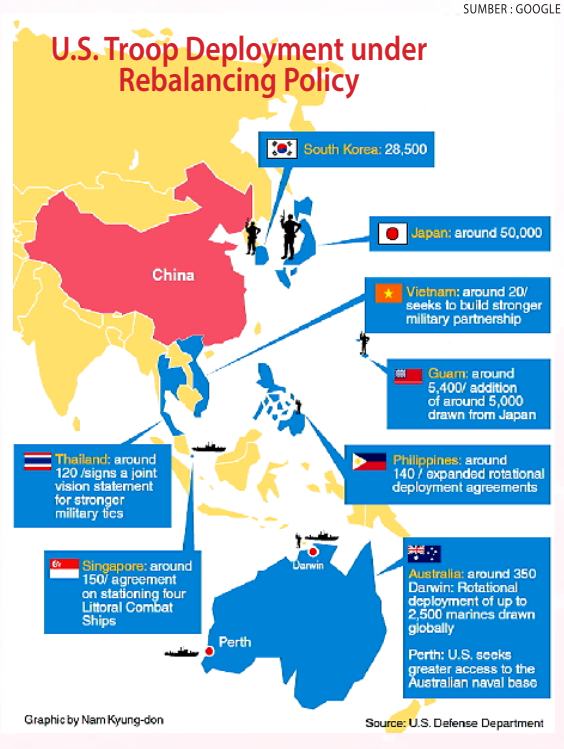

AS telah menempatkan kekuatan marinirnya di Darwin, Australia. AS juga telah menempatkan kapal-kapal perang pesisir (*Littoral Combat Ship*) di sekitar Singapura dan Filipina. Hampir bersamaan, AS telah memindahkan kekuatan pasukan marinir dari Okinawa ke Guam, Hawai, dan Alaska. Pada akhir tahun 2020, kekuatan kapal perang Angkatan Laut (AL) AS di kawasan Pasifik akan mencapai 60% dari kekuatan AL AS.

Beberapa negara sekutu dan mitra AS di kawasan telah mengajukan keinginan mereka agar kehadiran AS terus diperkuat untuk mengimbangi perkembangan kekuatan Tiongkok. Oleh karena itu, AS telah dan akan melakukan revitalisasi hubungan bilateral dan multilateral keamanannya dengan negara-negara setempat, yaitu di Australia (revitalisasi ANZUS) dan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Penerapan strategi AS dan implikasinya di Asia Pasifik akan atau dapat dipandang sebagai bagian dari upaya AS untuk mengurung dan mengucilkan Tiongkok, sehingga Tiongkok akan bereaksi dengan terus membangun kekuatan militernya.

Persengketaan di Laut Tiongkok Selatan akan mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kawasan Laut Tiongkok Selatan, jika dilihat dalam tata lautan internasional, merupakan kawasan strategis yang bernilai ekonomis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena potensi geografis dan sumber daya alam yang dimilikinya. Kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional). Dengan demikian, kawasan itu berpeluang untuk dieksplorasi, tetapi sekaligus berpotensi menjadi persaingan yang dapat menjurus pada konflik secara terbuka.

Persengketaan di Laut Tiongkok Selatan berpotensi menjadi konflik karena empat alasan. *Pertama,* konflik di kawasan tersebut melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Tiongkok. *Kedua*, para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan sering menggunakan instrumen militer untuk memperkuat klaimnya. *Ketiga,* ada keterlibatan negara-negara *major power* di dalam konflik tersebut. *Keempat,* belum ada bentuk institusi atau instrumen sosial yang cukup kredibel dalam menyelesaikan persengketaan di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Hingga saat ini, keenam negara yang mengklaim kawasan tersebut tetap berada pada posisi masing-masing. Filipina, misalnya, tetap mengklaim bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan Filipina Barat. Tiongkok keberatan atas klaim tersebut.

Selain Filipina, Vietnam juga melakukan hal yang serupa. Vietnam melakukan klaim bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan Vietnam Utara berdasarkan bukti sejarah. Vietnam mengklaim telah menguasai kawasan tersebut terutama Kepulauan Spratly dan Paracel sejak abad ke-17. Begitupula dengan Malaysia dan Brunei Darussalam yang melakukan klaim wilayah tersebut atas dasar wilayah zona eksklusif ekonomi sesuai dengan UNCLOS 1982.

Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan Laut Tiongkok Selatan. Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki sekitar kawasan ini adalah Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Sementara Tiongkok yang baru menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1988, secara agresif membangun konstruksi dan instalansi militer serta menghadirkan militernya secara rutin.

SUMBER : GOOGLE

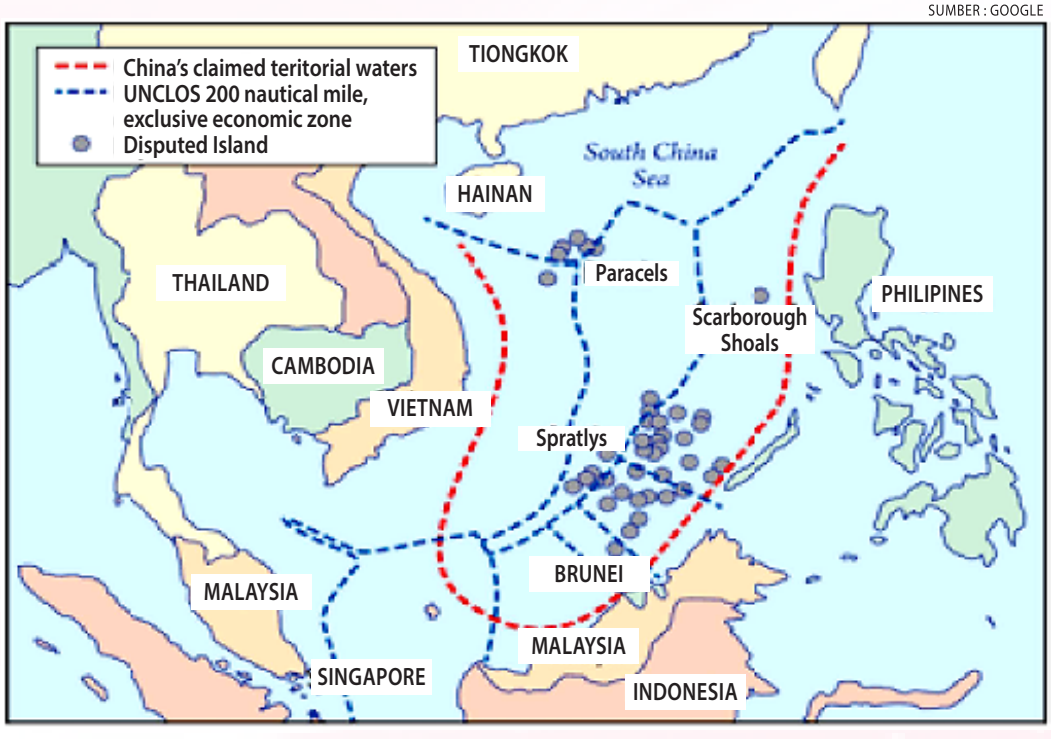

2.3 MODERNISASI KEKUATAN MILITER

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik melakukan upaya modernisasi kekuatan militernya. Sebagai salah satu konsekuensi meningkatnya kesejahteraan nasional, beberapa negara di kawasan telah menggunakan kesempatan tersebut untuk menambah anggaran belanja pertahanan dalam rangka meningkatkan kapabilitas kekuatan pertahanannya. Alasan lain dari beberapa negara melakukan modernisasi kekuatan militernya dikarenakan adanya beberapa wilayah di dunia dan di kawasan yang masih menyimpan potensi konflik.

Modernisasi kekuatan militer juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pertahanan. Beberapa negara di kawasan telah memodernisasi sistem persenjataannya diantaranya, peluru kendali udara ke udara, peluru kendali darat ke udara, sistem peluru kendali bawah permukaan ke udara dan darat, kemampuan pertempuran udara dan laut, radar penginderaan modern, sistem peringatan dini, sistem peperangan elektronik dan sistem peperangan siber.

SUMBER : GOOGLE

SUMBER : GOOGLE

Australia. Pemerintah Australia berencana untuk memodernisasi kekuatan *Australian Defense Forces* (ADF). Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan ADF untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, sejak 2009 Pemerintah Australia telah menyetujui 129 proposal pembangunan ADF. Proposal tersebut diantaranya, pengadaan pesawat angkut berat C-17, pesawat C-27 *Battlefield Airlift,* pesawat EA-18G *Growler*, pesawat tempur F/A-18F dan F-35A, kapal perang *Air Warfare Destroyer*, kapal pendarat amfibi, kapal selam masa depan (*Future Submarine*), satelit komunikasi di darat dan luar angkasa, teleskop Pengintaian Luar Angkasa dan pesawat pengintai maritim P-8A.

Australia juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan pesawat tanpa awak untuk kepentingan *intelligence, surveillance and reconnaissance*, *interdiction and close air support* dan operasi pengamanan perbatasan. Modernisasi ADF didukung oleh industri pertahanan yang sedang ditransformasi agar memiliki transparansi dan akutabilitas yang tinggi, efektifitas dan efisiensi yang meningkat serta memaksimalkan dana yang ada.

SUMBER : GOOGLE

India. Angkatan Bersenjata India sedang melaksanakan suatu proses modernisasi yang masif. Pemerintah India akan membeli pesawat tempur *Rafale*, helikopter serang *Apache,* helikopter angkut *Chinook dan* pesawat tanker A 330 serta meriam *ultra light howitzer*. India terus mengembangkan misil *Agni V* yang dapat membawa hulu ledak nuklir dengan jangkauan tembak berjarak 5000 km. India termasuk lima negara yang memiliki teknologi pembuatan kapal induk, kapal selam, pesawat tempur dan tank yang didukung oleh infrastruktur industri pertahanan yang mandiri.

Jepang. Pemerintah Jepang bersiap untuk merubah orientasi pertahanan dari yang bersifat *deterrent effect oriented* menjadi *response capability oriented*. Dengan perubahan tersebut Jepang akan aktif dalam percaturan pertahanan di kawasan. Jepang telah memiliki pesawat F-35, kapal induk pengangkut helikopter *Izumo*, melanjutkan program pembuatan kapal selam, dan pembelian pesawat tanpa awak dalam upaya meningkatkan kemampuan militernya.

Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan memodernisasi dan merevitalisasi militernya dengan mengadakan kendaraan tempur lapis baja, pesawat tempur F-35A, sistem persenjataan anti rudal *Aegis* dan *Patriot*, pengadaan kapal selam tipe 214 generasi baru KSS-III yang dapat membawa misil penjelajah *Hyunmoo-3*.

Malaysia. Pemerintah Malaysia memodernisasikan alutsista dengan menambah kapal selam modern *Scorpene* yang dikerjakan di galangan kapal Perancis. Malaysia juga melengkapi kekuatan militernya dengan membeli tank PT-91 *Twardy* dari Polandia dan pesawat tempur SU-27/30 dari Rusia.

SUMBER : GOOGLE

Filipina. Pemerintah Filipina melakukan revitalisasi pangkalan militer Teluk *Subic* dan revitalisasi pangkalan udara *North Field* di Pulau Tinian. Filipina telah merubah peran angkatan bersenjatanya yang semula dirancang untuk pertahanan internal kini diberikan peran untuk mewujudkan pertahanan eksternal. Pemerintah Filipina telah melakukan negosiasi untuk membeli pesawat *fighters d*ari Korea Selatan dan bahkan mempertimbangkan untuk pengadaan *Frigat* yang dipersenjatai dengan rudal dari Italia.

Singapura. Pemerintah Singapura terus memperbaruhi angkatan bersenjatanya. Singapura telah mampu mengubah kekuatan angkatan bersenjatanya menjadi kekuatan militer yang modern. Kekuatan Singapura tidak hanya kapal selam, tapi juga pesawat tempur F-15SG dan F-16 C/D yang didukung oleh beberapa jaringan *airbone early warning and control* (AEW & C) dan pesawat pengisian bahan bakar udara. Singapura juga akan menerima tambahan kapal selam kelas *Archer* dan kemungkinan akan menjadi negara Asia kedua, setelah Jepang, untuk mendapatkan F-35 *Joint Strike Fighter* Amerika.

SUMBER : GOOGLE

Vietnam. Pemerintah Vietnam membangun sistem pertahanan udara yang modern dengan mendatangkan pesawat Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia. Vietnam juga akan memperkuat jajaran angkatan lautnya dengan kapal selam kelas *varshavyanka* (penyempurnaan dari kelas Kilo) yang dilengkapi dengan teknologi siluman (*stealth*).

Tren modernisasi kekuatan militer strategis di kawasan Asia Pasifik akan meningkatkan ketegangan dan kompetisi kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik. Dinamika perkembangan ini membawa pengaruh terhadap strategi pertahanan Indonesia dalam rangka ikut serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan.

2.4 ISU PERBATASAN ANTARNEGARA

Di kawasan Asia Pasifik masih terdapat sengketa perbatasan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh semua pihak. Fakta empiris menyatakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perang adalah persoalan batas wilayah. Di Laut Tiongkok Timur masih terjadi saling klaim atas kepemilikan Pulau *Senkaku* (Jepang) atau *Diaoyu* (Tiongkok) antara Tiongkok dan Jepang. Terkait dengan sengketa di wilayah laut Tiongkok Timur, Tiongkok telah menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) yang tumpang tindih dengan sebagian wilayah Jepang dan Korea Selatan. Perkembangan di Laut Tiongkok Timur akan meningkatkan kompleksitas permasalahan. Walaupun penerapan ADIZ merupakan hal yang lazim dan merupakan hak dari negara berdaulat di wilayahnya, namun ADIZ dinilai kontroversial oleh negara- negara di sekitarnya. Negara-negara disekitar Laut Tiongkok Timur menganggap ADIZ bukan hanya instrumen kedaulatan tetapi juga instrumen kekuasaan atas wilayah yang disengketakan.

Sementara itu, di Laut Tiongkok Selatan masih terjadi persoalan tumpang tindih pengakuan batas wilayah di Kepulauan Spratly dan Paracel yang melibatkan Tiongkok dengan beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei. Persoalan ini mengundang perhatian dunia, khususnya AS, dan beberapa negara lain yang berkepentingan dengan jalur pelayaran dan perdagangan serta kebebasan bernavigasi dan jalur komunikasi.

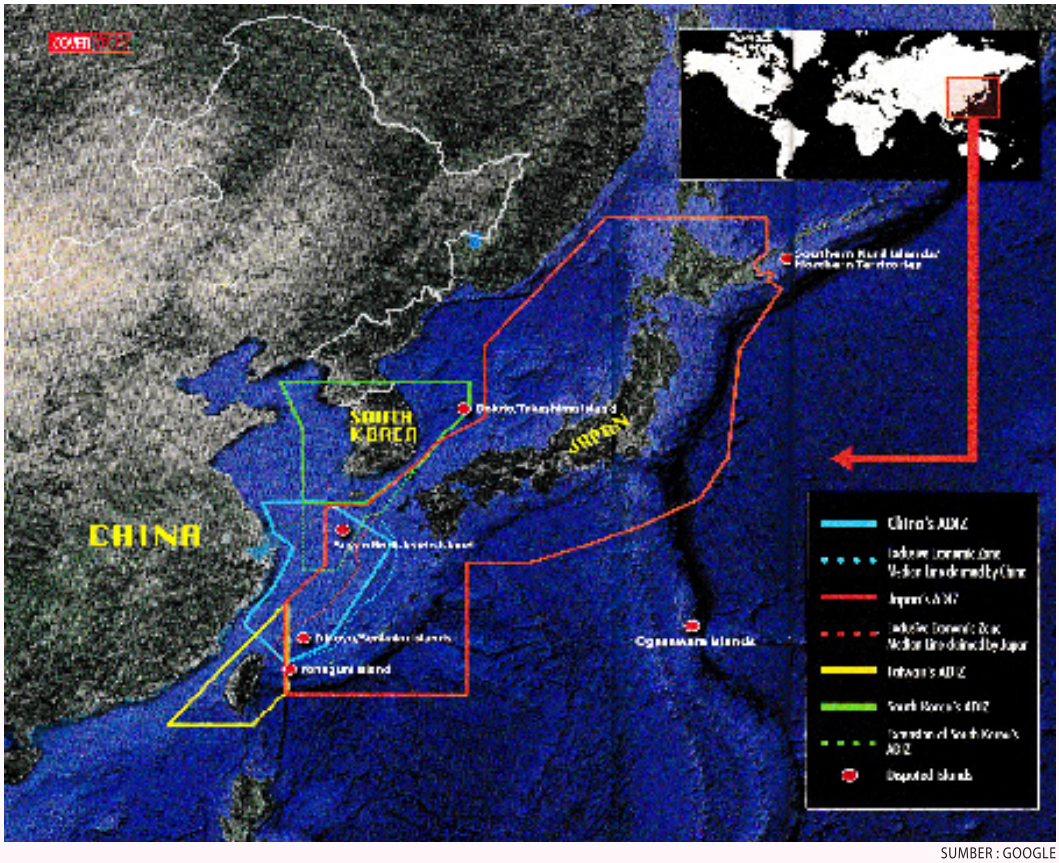

SUMBER : GOOGLE

Indonesia memiliki kepentingan untuk mengikuti perkembangan situasi di Laut Tiongkok Selatan. Sejak tahun 1994 terdapat tumpang tindih klaim batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Tiongkok Selatan sebelah utara Kepulauan Natuna berdasarkan *nine-doted-lines* yang ditentukan secara sepihak oleh Tiongkok. Saat ini Tiongkok masih menerapkan kebijakan *low profile* terkait klaim wilayah perairan di utara Kepulauan Natuna. Apabila Tiongkok secara sepihak menguasai ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna, maka akan mempengaruhi peluang Indonesia untuk mengelola potensi sumber daya alam seperti perikanan, minyak dan gas.

Indonesia dan Malaysia masih memiliki masalah perbatasan. Kedua negara memiliki perbatasan darat sepanjang 2.004 km. Di sepanjang perbatasan darat masih terdapat sembilan permasalahan *Outstanding Boundary Problems* (OBP) di Pulau Kalimantan dan satu OBP masih dalam kajian.

Sementara permasalahan batas laut sedang dirundingkan secara intensif, terutama masalah laut teritorial di Selat Malaka bagian selatan, perairan Tanjung Datu, Laut Sulawesi, perairan sebelah utara Pulau Bintan. Sedangkan batas ZEE antara lain di Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan dan Laut Sulawesi yang meliputi perairan sekitar Blok Ambalat. Klaim Malaysia atas sebagian wilayah perairan Blok Ambalat serta belum terselesaikannya perundingan batas darat dan batas laut berpotensi menjadi sumber ketegangan dan konflik.

Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) masih memiliki permasalahan perbatasan. Perbatasan darat kedua negara terletak pada posisi 141° BT sepanjang 820 km yang membentang dari utara ke selatan. Permasalahan perbatasan cenderung ke arah *capacity building,* yaitu sedikitnya jumlah tugu batas utama yang hanya terpasang 52 tugu MM dan 1.792 tugu perapatan, itupun belum disahkan oleh pihak PNG. Erosi secara terus-menerus dalam jangka waktu lama yang terjadi pada tebing Sungai Fly antara MM 10 sampai dengan MM 11 A berpotensi mengurangi wilayah Indonesia, apabila tidak segera dilakukan penanggulangan.

Indonesia dan Timor Leste dengan panjang garis batas negara masing-masing sekitar 149,1 km dan 119,7 km masih memiliki dua permasalahan garis batas di *unresolved segment*. Segmen pertama, di Noelbesi, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan Distrik Oecusee, Timor Leste dengan luas ± 1.069 ha. Segmen kedua, di Bijael Sunan, Oben, Kabupaten Timor, merupakan areal seluas ±142,7 ha. Atas kesepakatan kedua belah pihak, di wilayah tersebut tidak dilakukan aktifitas.

Indonesia masih memiliki permasalahan perbatasan laut dengan Timor Leste, Singapura, Vietnam, Palau, Australia, India, dan Thailand.

Perbatasan baik laut territorial maupun ZEE antara Indonesia dan Timor Leste belum diselesaikan sampai batas darat selesai penetapannya. Perbatasan laut teritorial antara Indonesia dan Singapura Segmen Timur termasuk sekitar Karang *Pedra Branca* masih belum terselesaikan. Batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam di Laut Tiongkok Selatan sebelah utara Kepulauan Natuna serta Batas ZEE antara Indonesia dan Palau di Samudera Pasifik hingga saat ini juga masih dalam proses perundingan.

Secara umum perbatasan laut antara Indonesia dan Australia yang meliputi batas Landas Kontinen dan batas ZEE sudah tidak begitu masalah lagi. Akan tetapi perjanjaian ZEE yang telah ditandatangani tahun 1997 meliputi ZEE di Selatan Pulau Jawa, Pulau Chrismast, Karang Ashmore sampai dengan Laut Arafuru hingga saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia maupun Australia.

Perbatasan ZEE Indonesia dengan India di Samudera Hindia sampai di Laut Andaman belum pernah dibawa di meja perundingan. Demikian juga dengan batas ZEE antara Indonesia dan Thailand di perairan utara Selat Malaka juga belum pernah dirundingkan.

Permasalahan di perbatasan berpotensi menyebabkan ketegangan dan konflik. Selain masalah perbatasan yang belum terselesaikan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia juga memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar, diantaranya ada 12 pulau yang memerlukan prioritas dalam pengelolaan agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjaga.

SUMBER : GOOGLE

Permasalahan perbatasan negara yang belum tuntas dan kondisi pulau-pulau kecil terluar yang belum dikelola dengan baik dari aspek keamanan dan aspek kesejahteraan berpotensi memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil alih sebagian wilayah Indonesia di perbatasan.

DUA BELAS PULAU TERLUAR

SUMBER : GOOGLE

1. Pulau RONDO
2. Pulau BERHALA
3. Pulau NIPA
4. Pulau SEKATUNG
5. Pulau DANA
6. Pulau BATER
7. Pulau MARORE
8. Pulau MIANGAS
9. Pulau MARAMPIT
10. Pulau FANI
11. Pulau FANILDO
12 Pulau BRASS

2.5 KONFLIK INTRA DAN ANTARNEGARA

Konflik intra dan antarnegara masih terjadi di beberapa kawasan dunia. Di kawasan Afrika masih terjadi konflik internal, bahkan sampai perang saudara yang menyebabkan terjadinya korban, kekerasan dan pengungsian penduduk. Konflik terjadi karena dipicu masalah pertarungan politik dan kekuasaan, ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial dan ekonomi, persaingan akses ke sumber daya, penindasan serta kepemimpinan yang korup dan tidak demokratis.

Konflik intra negara cenderung bereskalasi dan bertransformasi. Konflik yang terjadi di beberapa kawasan di Kongo, Mali, Suriah, Sudan, Sudan Selatan, Afrika Tengah, Israel-Palestina, Irak, Afghanistan, Pakistan dan Filipina masih terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat dan berubah menjadi perang sipil yang sulit diselesaikan. Sementara, konflik antarnegara masih berpotensi terjadi di Semenanjung Korea karena para pihak yang terlibat cenderung saling melakukan tindakan yang bersifat provokatif. Upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme perundingan *Six Parties Talk* masih menemui jalan buntu.

Intervensi militer ke negara-negara yang terlibat konflik. Dalam rangka membantu menyelesaikan dan atau untuk melindungi penduduk sipil agar tidak menjadi korban konflik intra dan antar negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan akan melakukan langkah-langkah antara lain mengeluarkan resolusi. Kebijakan dalam mengeluarkan resolusi sesuai kepentingannya dimulai dari resolusi yang bersifat lunak seperti pelarangan terbatas, embargo hingga resolusi yang bersifat keras seperti intervensi militer terhadap negara-negara yang dinilai tidak mampu melindungi keselamatan penduduk sipil. Intervensi militer dilakukan atas dasar mandat Dewan Keamanan PBB dan norma serta tanggungjawab untuk melindungi (*Responsibility to Protect*/R2P) yang diterapkan oleh beberapa negara. Intervensi militer tersebut dilaksanakan tanpa harus mendapat persetujuan negara yang bersangkutan (*without consent*).

Protection of the Civilian (POC) adalah seluruh kegiatan yang ditujukan pada pemenuhan penghormatan atas hak-hak individu yang sesuai dengan semangat dan isi lembaga-lembaga hukum seperti *Universal Declaration on Human Right* 1948, Hukum Humaniter Internasional, dan hukum terkait para pengungsi.

Organisasi kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan tidak berpihak (*impartial manner*), dalam arti tidak dilandasi atas dasar ras, bangsa, asal suku, bahasa ataupun jenis kelamin.

Pengerahan pasukan pemelihara perdamaian akan meningkat. Konflik yang masih berlangsung di beberapa kawasan dunia akan menyita perhatian Dewan Keamanan PBB. Peran penting untuk menciptakan tatanan dalam menyelesaikan konflik di dunia akan semakin menonjol. Dengan demikian, pengerahan pasukan perdamaian PBB akan semakin meningkat, terutama di wilayah Afrika dan Timur Tengah serta di Semenanjung Korea.

2.6 KECENDERUNGAN KONFLIK KONTEMPORER

Pada dekade terakhir, pola konflik bersenjata mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan teknologi pertahanan, upaya untuk menghindari jatuhnya korban, biaya perang yang tinggi, semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional yang terkait dengan perang telah mempengaruhi kecenderungan bentuk konflik di dunia.

Pola untuk menguasai ruang sudah tidak lagi dilakukan secara frontal, tetapi dilakukan dengan cara-cara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat *proxy war*. Tren untuk menguasai suatu negara dengan menggunakan "senjata" berupa isu pelanggaran Hak Asasi Manusia, demokratisasi, senjata pemusnah massal, pemimpin yang tirani, ketidakadilan ekonomi, sosial budaya, dan korupsi semakin mengemuka. Pluralisme suatu negara juga digunakan untuk menumbuhkan ancaman yang ditebarkan berdasarkan perbedaan agama/sekte, suku, ras, dan antar golongan.

SUMBER : GOOGLE

Pola *Devide et impera* atau memecah-belah dari dalam negeri merupakan cara yang efektif untuk menghancurkan suatu negara dari dalam. Sebagaimana yang telah terjadi pada fenomena *Arab Spring*, kekacauan politik dan keamanan di Mesir, perang saudara Irak, Afghanistan, Libya, dan di Suriah serta konflik di utara Rusia dan Ukraina yang berujung pada lepasnya Crimea dari Ukraina membuktikan adanya perubahan pola konflik.

Pola konflik cenderung menjadi konflik yang asimetris. Konflik dibangun secara sistematis melalui tahapan yang terencana dengan tema ekonomi, sosial, politik, Hak Asasi Manusia, terorisme, demokratisasi, dan lingkungan hidup, termasuk penggantian rezim yang otoriter dan isu senjata pemusnah massal. Penciptaan kondisi lewat propaganda dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, termasuk media *mainstream* jejaring sosial.

Konflik dikembangkan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, diisukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia, terorisme, tuntutan demokratisasi dan reformasi politik, penggantian pemimpin yang tirani, isu ancaman senjata pemusnah massal. *Kedua,* muncul bentuk-bentuk ketidakpuasaan masyarakat di berbagai aspek kehidupan melalui aksi demonstrasi besar-besaran. *Ketiga*, munculnya aksi demonstrasi yang bersifat anarkis yang berubah menjadi kerusuhan sosial dan konflik antarkelompok masyarakat atau konflik horisontal. *Keempat,* peningkatan konflik komunal menjadi perang saudara atau perang sipil. *Kelima,* permintaan mandat atau resolusi PBB untuk pemberian embargo atau sangsi ekonomi dan perdagangan, bahkan politik. *Keenam*, munculnya mandat Dewan Keamanan PBB yang melegalkan penggunaan kekuatan militer atau pengiriman pasukan untuk melakukan intervensi dengan alasan *peace enforcement* dan *peace making*.

Kemajuan teknologi juga akan mempengaruhi bentuk dan pola perang di masa yang akan datang. Walaupun pola dan bentuk perang asimetris masih terjadi di beberapa wilayah, namun inovasi teknologi persenjataan perang konvensional tetap saja terus berlangsung dengan cepat.

SUMBER : GOOGLE

Kemajuan teknologi telah menyebabkan sistem persenjataan terus berkembang yang pada akhirnya mempengaruhi bentuk dan pola perang di masa yang akan datang. Perang di masa yang akan datang akan semakin mempertimbangkan untuk mengurangi kerusakan yang berlebihan (*collateral damage*) terutama di kalangan sipil, dengan menerapkan teknologi siluman (*stealth technology*) seperti yang digunakan oleh pesawat tanpa awak (*Unmanned Aeral Vehicle*), dan penerapan teknologi untuk mencapai akurasi yang tinggi dan lebih mematikan seperti dalam bom pintar (*smart bom),* roket dan misil. Pengurangan risiko jatuhnya korban di pihak sendiri, dikembangkan melalui penerapan teknologi robot (*robotic technology*) pada berbagai sistem persenjataan yang dapat mengurangi pengerahan pasukan secara besar-besaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menciptakan peperangan berbasis jaringan *(Network Centric Warfare)* yang mengandalkan keunggulan informasi, sekaligus melaksanakan perang informasi, perang urat syaraf dan perang elektronika.

2.7 ISU SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Dunia masih menghadapi ancaman penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan berbahan peledak (*CBRN-E*). Ada kecenderungan bahwa dunia sedang menghadapi suatu fenomena baru berupa ancaman atau tindak kekerasan yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa massal dan kerusakan luar biasa yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik kelompok tertentu, terutama aktor bukan negara (*Non-state Actors*).

SUMBER : GOOGLE

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak yang bersamaan dengan kemajuan alat transportasi dan komunikasi informasi telah meningkatkan penguasaan, penggunaan, dan penyebaran bahan dan ilmu pengetahuan tentang *CBRN-E* untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Namun, penggunaan dan penyebaran bahan-bahan berbahaya tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan umat manusia, terutama bila secara ilegal dapat dikuasai oleh kelompok-kelompok teroris. Kerawanan penyebaran dan penggunaan bahan-bahan berbahaya diperjelas dengan fakta bahwa masih terdapat beberapa negara yang memproduksi bahan-bahan berbahaya tersebut, tetapi tujuan pembuatannya tidak transparan.

Indonesia berpotensi menghadapi ancaman penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang yang dinilai strategis bagi jalur komunikasi pelayaran dan penerbangan. Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia berpotensi menghadapi ancaman penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak apabila penanganannya tidak sesuai prosedur dan tidak dapat diawasi atau disalahgunakan. Selain itu, keterbukaan wilayah perairan dan pelabuhan di Indonesia karena keterbatasan kemampuan pengawasan dan pengamanan juga menyebabkan Indonesia rawan menjadi wilayah perdagangan, pelintasan, dan penyebaran bahan-bahan berbahaya secara ilegal *(Illicit Trafficking of CBRN-E Material).*

2. 8 TERORISME

Proses globalisasi yang sedang berlangsung masih memberikan peluang bagi organisasi terorisme global untuk berkembang. Organisasi-organisasi teroris masih memanfaatkan era keterbukaan untuk mendapatkan informasi dan saling bekerja sama secara internal antara satu organisasi teroris dan yang lainnya. Peluang tersebut masih dipergunakan oleh organisasi-organisasi teroris untuk mengamankan akses secara geografi dan untuk mendapatkan persenjataan serta dukungan finansial dan tempat-tempat berlindung, sebagaimana yang terjadi di Afrika Utara, Afrika Tengah, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Pada kondisi tersebut, organisasi teroris global, termasuk kelompok-kelompok radikal keagamaan, melaksanakan aksi-aksi terror di negara-negara miskin yang situasi politiknya tidak stabil dan pemerintahannya lemah.

SUMBER : GOOGLE

Kelompok terorisme global masih tetap eksis. Kematian tokoh teroris dari kelompok Al Qaeda, Osama bin Laden, tidak mengurangi kemungkinan serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok Al Qaeda. Walaupun kemampuan komando dan pengendalian organisasi menurun, kelompok Al Qaeda telah menunjuk kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan kelompok Al Qaeda di Afrika Utara, Afrika Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tengah untuk melanjutkan aksi-aksi mereka. Kelompok-kelompok teroris lintas negara memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi untuk melaksanakan aksinya di Aljazair, Libia, Mali, Sudan, Sudan Selatan, Kenya, Somalia, Nigeria, Suriah, Yaman, Afghanistan, Pakistan dan Irak.

Teroris perorangan cenderung tumbuh. Selain dalam hubungan kelompok, terdapat individu-individu radikal yang menjadi teroris-teroris perorangan walaupun tidak mempunyai afiliasi dengan Al Qaeda atau terinspirasi oleh ideologi Al Qaeda. Mereka ini sering disebut *home-grown terrorist* yang kadang-kadang sangat sulit untuk mengetahui motif mereka melaksanakan tindak kekerasan terorisme. Motif mereka dapat diinspirasi oleh adanya konflik di suatu wilayah, atau adanya kebencian terhadap kebijakan negara barat, dan karena provokasi propaganda kepada kelompok radikal.

Ancaman aksi terorisme di Indonesia masih tetap ada. Walaupun aksi terorisme di Indonesia cenderung menurun, hal itu tidak mengurangi kemungkinan terjadinya aksi terorisme. Tindakan *counter terrorism* yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia telah berhasil membongkar jaringan terorisme di beberapa tempat di Indonesia. Beberapa pelaku telah berhasil ditangkap dihukum dan dipenjarakan, bahkan beberapa dari mereka telah terbunuh. Namun, terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa ancaman aksi terorisme masih belum sepenuhnya dapat ditiadakan. Walaupun telah dilakukan upaya deradikalisasi, kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap radikal masih terus berlangsung tanpa dapat dibatasi. Media komunikasi terutama internet masih dianggap sangat efektif sebagai wahana untuk menyampaikan pesan-pesan radikal yang bersifat menghasut.

Data dari aparat keamanan menunjukkan adanya proses regenerasi di kalangan kelompok radikal di Indonesia karena selalu muncul wajah-wajah dan kelompok-kelompok baru yang diduga terlibat merencanakan aksi terorisme. Kelompok-kelompok radikal menunjukkan eksistensinya dalam aksi-aksi untuk menentang kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan praktik-praktik keagamaan. Perubahan aksi terorisme juga ditandai dengan aksi penyerangan dan perlawanan bersenjata terhadap personil dan markas aparat keamanan, bahkan terdapat indikasi yang kuat adanya ancaman aksi terorisme terhadap pejabat negara dan objek vital strategis nasional.

2.9 SPIONASE

Kegiatan intelijen dengan berbagai cara dan metode cenderung dilakukan oleh setiap negara. Pada era saat ini hingga lima tahun ke depan, dengan situasi lingkungan strategis berkembang secara dinamis, penuh ketidakpastian, situasinya sangat kompleks dan mudah berubah, sangat sulit bagi suatu negara untuk mengidentifikasikan dan mengetahui hakikat ancaman dan tantangan terhadap kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, untuk menjawab hakikat ancaman dan tantangan terhadap kepentingan nasionalnya, negara-negara tersebut akan berusaha mendapatkan informasi strategis.

Upaya mendapatkan informasi akan dilakukan dengan kegiatan intelijen. Berbagai bentuk kegiatan intelejen antara lain intelijen dengan menggunakan agen, klandestin atau mata-mata (*Human Intelligence*) maupun dengan penggunaan teknologi seperti intelijen citra (*Imagery Intelligence*), intelijen sinyal *(Signals Intelligence),* intelijen pengukuran (*Measurement and Signature Intelligence*), intelijen elektronik (*Electronic Intelligence*), intelijen teknik (*Technical Intelligence*) dan intelijen sumber terbuka (*Open Source Intelligence*).

Indonesia akan tetap menjadi objek kegiatan spionase negara asing. Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Letak geografisnya dinilai amat strategis. Indonesia tumbuh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia juga merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu, dinamika politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan termasuk ancaman terorisme di Indonesia hampir selalu menjadi perhatian masyarakat dunia, karena banyak kepentingan asing di Indonesia. Kondisi geopolitik dan geostrategis seperti itu akan menjadikan Indonesia sebagai sasaran kegiatan intelijen termasuk penyadapan pihak asing. Pihak asing selalu ingin tahu lebih dahulu atas berbagai hal yang terjadi di Indonesia termasuk berbagai kecenderungan yang akan terjadi, terutama bidang politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

SUMBER : GOOGLE

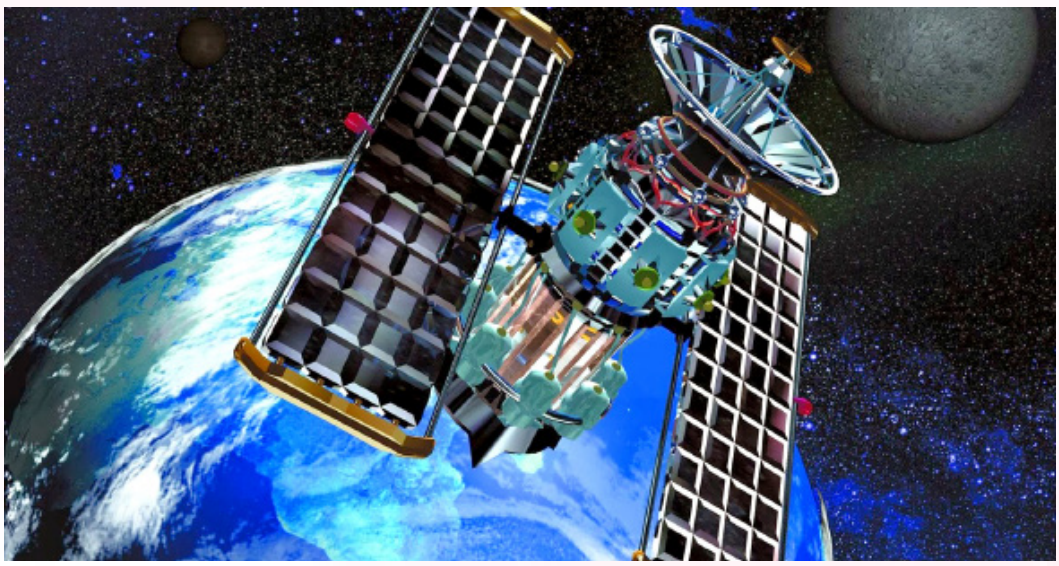

2.10 KEJAHATAN LINTAS NEGARA

Kawasan Asia Tenggara masih rawan terhadap kejahatan lintas negara. Sesuai dengan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002, di kawasan Asia Tenggara terdapat 8 jenis kejahatan lintas negara yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, *sea-piracy*, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan siber.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lautan yang luas dan rawan adanya gangguan keamanan. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan empat *choke points* yang strategis bagi kepentingan global. Ketiga ALKI tersebut, ALKI I yang melintasi Laut Tiongkok Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda. ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok. ALKI III melintasi Samudera Pasifik, Selat Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda. Sedangkan empat *choke points* meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar. Kawasan-kawasan maritim tersebut memiliki nilai strategis bagi kepentingan negara-negara di dunia, terutama sebagai jalur perdagangan dan transportasi serta komunikasi, sehingga akan mendorong negara-negara tersebut meningkatkan pengamanannya.

Secara geostrategi Indonesia berkewajiban untuk mengamankan jalur pelayaran internasional di Selat Malaka. Selat Malaka terletak antara Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaka yang merupakan kawasan lalu lintas perdagangan terpadat di dunia yang menghubungkan Asia Barat dan Asia Timur. Setiap hari sedikitnya 140 kapal atau 50.000 kapal per tahun membawa 30% barang perdagangan dunia serta 11 juta barel minyak dari Timur Tengah ke Jepang dan Tiongkok. Isu keamanan di Selat Malaka masih diwarnai oleh adanya gangguan perompakan dan pembajakan laut. Walaupun telah terjadi penurunan namun potensi terjadinya perompakan dan pembajakan di laut masih tetap ada. Ketidak pedulian dan ketidak mampuan untuk menjamin keamanan laut di Selat Malaka akan memancing negara lain ikut campur dalam mengamankannya.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perkembangan jenis kejahatan lintas negara. Perkembangan teknologi kerap mempengaruhi kecenderungan peningkatan kejahatan pencurian dan penyelundupan objek-objek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, *environmental crime,* antara lain pencurian kayu dan pencurian ikan serta *computer-related crime*.

Saat ini berkembang pencurian terhadap satwa-satwa liar hidup maupun mati termasuk tumbuh-tumbuhan. Secara umum kejahatan ini merujuk secara luas kepada *non-violent crime* yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial.

Di belahan dunia lain, telah dibuktikan bahwa jaringan kejahatan lintas negara, yaitu kejahatan narkotika, mempunyai hubungan erat dengan sumber pendanaan kelompok teroris dan separatis. Perkembangan terorisme yang tumbuh dari dalam wilayah sendiri (*home grown terrorism)* dan kelompok kejahatan beraliran keras yang dikategorikan sebagai *violent extremist organisation* (VEO) sangat dipengaruhi oleh perkembangan kejahatan antar negara. Fenomena semacam itu akan mempengaruhi perkembangan dunia yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih aman, tenteram, damai, dan sejahtera di masa depan.

Kejahatan lintas negara masih merupakan tantangan bagi Indonesia. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan warga bangsa dari mata rantai kejahatan lintas negara. Indonesia masih ditantang untuk menghadapi kejahatan peredaran gelap narkotika, perdagangan dan penyelundupan manusia atau *human trafficking*, *illegal immigrant*, terorisme, korupsi serta kejahatan terorganisasi yang dikendalikan aktor bukan negara (*non state actors*).

SUMBER : GOOGLE

Fenomena ragam kejahatan khususnya kejahatan lintas negara yang terorganisasi akan berdampak besar pada penurunan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan ini juga merongrong keamanan dalam negeri, berpotensi mengganggu kedaulatan negara, dan ikut mengancam stabilitas pembangunan ekonomi.

2.11 DINAMIKA PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Perubahan strategis dunia saat ini merupakan produk globalisasi yang didorong oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dunia sedang mengalami kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan seperti teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi, teknologi nano, perkembangan teknologi persenjataan khususnya teknologi senjata pemusnah massal, maupun pesawat tak berawak dan berbagai teknologi lainnya. Kemajuan itu membawa dampak positif maupun negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan telah membawa pada situasi keamanan dunia yang mengkhawatirkan, antara lain penggunaan ruang siber yang berimplikasi pada kejahatan siber dan bersifat tak mengenal batas; rekayasa genetika bioteknologi yang berimplikasi negatif; kemampuan teknologi nano yang mampu membuat produk sangat kecil sehingga sulit dideteksi misalnya alat penyadap dalam sebuah komputer; rekayasa teknologi penerbangan dan nuklir dalam pembuatan senjata nuklir maupun wahana peluncur baik roket, peluru kendali maupun wahana terbang tidak berawak yang mampu melakukan pengintaian dan penghancuran yang dahsyat, serta teknologi ruang angkasa yang dimanfaatkan untuk mengeksplorasi ruang atmosfir.

SUMBER : GOOGLE

Ruang atmosfir didalamnya termasuk *Geostationary Orbit* dikategorikan sebagai ruang global **(***global common***)** berpotensi dan dimanfaatkan oleh negara maju. Indonesia sebagai negara equatorial terpanjang di atasnya terdapat 12,82% dari *Geostationary Orbit* yang membentang sepanjang katulistiwa. *Geostationary Orbit* merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki karakteristik khas dapat ditempati satelit untuk keperluan telekomunikasi, penyiaran, pemantauan cuaca navigasi lalu lintas laut dan udara serta untuk penginderaan atau pengintaian *(surveillance and reconnaisance)***.** Semua pihak dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan dan kepentingan umat manusia berdasarkan *Space Treaty* tahun 1967 pasal (1). Pada kenyataannya penggunaan ruang angkasa cenderung dikemas untuk kepentingan teknologi dan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi oleh negara-negara maju. Pemanfaatan *Geostationary Orbit* serta ruang angkasa untuk kepentingan militer masih sangat dirahasiakan dan hanya dikuasai oleh negara-negara tertentu.

Ruang angkasa *(Space)* tidak hanya dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara lain melalui penggunaan satelit mata-mata, tetapi *space* juga dapat menjadi sumber ancaman yang dipicu oleh adanya sampah ruang angkasa *(debris)***.** Saat ini diperkirakan jumlah sampah ruang angkasa mencapai 13.000 ukuran besar dan 700 ribu ukuran 1 cm. Sampah-sampah tersebut dapat mengancam keselamatan masyarakat apabila jatuh disuatu wilayah yang berpenduduk. Selain karena faktor alami, jatuhnya sampah ruang angkasa juga dapat dikendalikan dengan sasaran tertentu.

SUMBER : GOOGLE

Revolusi di bidang teknologi informasi telah mengubah lingkungan keamanan strategis secara signifikan. Lingkungan keamanan pada abad ke-21 telah berubah secara cepat dan signifikan seiring dengan penggunaan jaringan komunikasi dan informasi, terutama internet oleh masyarakat modern, termasuk di sektor pertahanan. Kemajuan teknologi dan informasi telah menyebabkan berbagai sektor kehidupan menjadi terhubung dalam suatu ruang siber *(cyber space)* yang tercipta oleh jaringan, kabel, dan alamat internet protokol (IP) melalui komputer dan sarana lain.

Perorangan dan komunitas terhubung, tersosialisasi, dan terorganisasi secara mendunia dalam dan melalui ruang siber. Di samping memberikan suatu dampak positif dari sisi informasi dan komunikasi, kecenderungan tersebut telah menciptakan suatu peluang bagi terjadinya kejahatan siber *(cyber crime).* Dari aspek pertahanan, ruang siber telah menghasilkan domain kelima yang dapat dijadikan sebagai medan peperangan *(cyber war)*, selain medan perang darat, laut, udara dan ruang angkasa. Aktor negara dan aktor non-negara akan memanfaatkan ruang siber untuk mengancam kepentingan dan keamanan negara lain.

Sektor pertahanan negara memiliki kerawanan terhadap serangan melalui siber (*cyber attack*). Penggunaan sistem, peralatan dan *platform* berbasis internet cenderung semakin meluas di sektor pertahanan. Namun, teknologi sistem pengamanan jaringan dan informasi sering tertinggal. Kerawanan tersebut akan dieksploitasi oleh aktor tidak dikenal (*anonymous*) dan organisasi intelijen asing untuk mencari informasi dari jaringan rahasia maupun tidak rahasia dan atau untuk mengganggu atau merusak jaringan informasi dan komunikasi. Serangan terhadap sistem informasi dan komunikasi juga dapat berbentuk serangan virus dan transmisi data dalam jumlah yang sangat besar secara simultan.

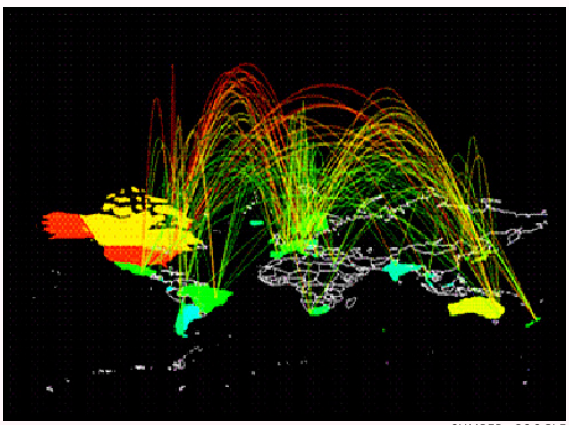

SUMBER : GOOGLE

2.12 PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim global *(Global Climate Change)* berpengaruh pada lingkungan kehidupan umat manusia. Perubahan iklim global telah memperlihatkan kecenderungan naiknya temperatur permukaan bumi, perubahan suhu air laut, perubahan ekosistem, naiknya permukaan air laut, perubahaan musim yang tidak menentu, meningkatnya curah hujan dan memperpanjang kekeringan, serta meningkatnya badai dan topan. Kecenderungan tersebut berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kebutuhan dasar umat manusia, terutama pangan, air, kesehatan dan energi.

SUMBER : GOOGLE

Perubahan iklim secara tidak langsung akan berpengaruh pada masalah keamanan. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar umat manusia akan menyebabkan terganggunya ketahanan, kemampuan berdaptasi dan kemampuan mengelola *stress* umat manusia yang pada akhirnya akan menyebabkan kerawanan bila ditinjau dari aspek keamanan. Secara tidak langsung, perubahan akan menyebabkan instabilitas politik, kekacauan perekonomian, krisis air, munculnya berbagai penyakit, migrasi penduduk dan konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal.

Sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah tropis, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap ancaman dan dampak perubahan iklim. Menurut laporan *Intergovermental Panel on Climate Change* (IPCC), karena Indonesia memiliki letak geografis dan kondisi geologis yang spesifik, sehingga Indonesia semakin rawan terhadap berbagai bencana alam yang terkait dengan iklim. Kenaikan permukaan air laut, meluasnya kekeringan dan banjir, menurunnya produksi pertanian, serta meningkatnya prevalensi berbagai penyakit yang terkait iklim, merupakan beberapa dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

SUMBER : GOOGLE

2.13 BENCANA ALAM

Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana alam. Sebagai negara yang terletak pada tiga lempeng *(plate)* yang selalu bergerak dan pada posisi *Pacific Ring of Fire* yang memiliki gunung berapi yang aktif, Indonesia rentan terhadap gempa tektonik maupun vulkanik. Indonesia memiliki 128 gunung berapi yang aktif dan sekitar 150 sungai besar dan kecil yang dekat atau melintasi pemukiman penduduk yang padat terutama di Pulau Jawa. Kejadian gempa yang berturut-turut di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa bencana alam merupakan permasalahan yang akan terus-menerus dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki berbagai macam bentuk bencana. Berdasarkan data yang ada, di Indonesia terdapat 12 kategori bencana. Kategori tersebut dapat dibagi dua, yaitu delapan bencana alam dan empat bencana sosial. Bencana alam terdiri dari tsunami, gempa bumi, banjir, puting beliung, kekeringan, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan kebakaran hutan. Bencana sosial terdiri dari kerusuhan sosial. konflik sosial, pencemaran lingkungan hidup dan kegagalan infrastruktur sosial.

2.14 KEAMANAN PANGAN, AIR, DAN ENERGI

Ketersediaan pangan dunia yang semakin berkurang, berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Kelangkaan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dunia, peningkatan kualitas hidup manusia, ketersediaan lahan yang semakin sempit, serta berkembangnya industri yang mengurangi lahan produktif. Diperkirakan penduduk dunia pada tahun 2050 mencapai 10 miliar sehingga memerlukan tambahan pangan sebesar 70% dibandingkan sekarang.

Lebih dari tiga dasawarsa badan pangan dunia *Food and Agriculture Organization* (FAO) belum mampu mengatasi masalah kelaparan yang terjadi di banyak negara seperti di negara Subsahara Afrika. Kemiskinan dan kelaparan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan stabilitas politik serta keamanan. Kedepan diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, dan perubahan iklim.

Indonesia belum memiliki ketahanan pangan. Indonesia masih mengalami ketergantungan pangan dari luar negeri. Berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat pertumbuhan dan kebutuhan penduduk yang pesat dan berkurangnya sumber daya manusia pengelola pertanian merupakan faktor penting penyebab lemahnya ketahanan pangan di Indonesia. Ketergantungan pangan Indonesia dari negara lain mencapai 70%. Di sisi lain, Indonesia berada di level serius dalam indeks kelaparan global. Hal ini diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia.

Indonesia rawan terhadap kelangkaan energi. Pertumbuhan penduduk dunia, laju perkembangan industri dan semakin tingginya arus lalu lintas barang dan jasa, menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan energi. Dengan semakin berkurangnya sumber-sumber energi dan belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi, diperkirakan minyak dan gas bumi menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan.

Saat ini AS dengan penduduk hanya sekitar 5% populasi dunia mengkonsumsi 20-25% energi dunia. Prediksi ke depan, pertumbuhan kebutuhan energi Tiongkok dan India akan mencapai 56% dari kebutuhan dunia pada tahun 2040. Diperkirakan pada tahun 2030 minyak sebagai sumber energi akan mengalami penurunan 36% dari total kebutuhan energi dunia. Cadangan energi Indonesia terutama energi fosil (minyak bumi, batubara) juga semakin hari semakin menyusut. Hal ini dipicu adanya pemborosan dalam penggunaan energi fosil.

Kemajuan bidang ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan ketersediaan energi fosil semakin berkurang karena konsumsi energi per kapita akan meningkat. Produksi minyak nasional diperkirakan akan terus menurun, sedangkan konsumsi BBM nasional cenderung terus meningkat sehingga kekurangannya harus ditutup melalui impor.

Indonesia masih rawan terhadap krisis air bersih. Hingga kini, sebanyak 1,2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke sumber-sumber air bersih yang aman dan terjangkau. Akibatnya, setiap tahun 2,2 juta orang meninggal karena berbagai penyakit. Indonesia juga akan menghadapi ancaman krisis air yang menjadi syarat utama kelanjutan kehidupan. Fenomena itu lebih banyak disebabkan salah urus lingkungan dan aset alam. Salah urus lingkungan dan aset alam tersebut terjadi secara akumulatif dan terus-menerus, karena Indonesia mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) guna menopang perekonomian. Pengelolaan SDA yang tidak benar menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, penurunan kualitas lingkungan hidup dan menipisnya ketersedian sumber daya alam. Hal itulah yang dapat memicu krisis pangan, air, energi, serta bencana ekologis. Krisis air di Indonesia juga disebabkan oleh persediaan air yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Krisis sumber pangan, air, dan energi berpotensi menimbulkan konflik. Isu *food, energy and water security*, dapat menjadi pemicu terjadinya konflik tidak hanya di suatu daerah ataupun negara, tetapi konflik global. Isu ketiga sumber daya strategis tersebut bisa menjadi sumber konflik baru, terutama jika dunia gagal mengolah atau mengontrol sumber yang ada sehingga mendorong terjadinya benturan kepentingan dan menyulut peperangan.

Jumlah penduduk dunia yang kini mencapai 6,6 miliar jiwa dan semakin bertambah, akan memberikan pengaruh pada tingkat kebutuhan pangan, energi, dan air. Ditambah pula dengan munculnya "kaum menengah" yang memiliki gaya hidup boros yang akan semakin meningkatkan permintaan kebutuhan. Fokus setiap negara akan beralih pada ketiga isu tersebut khususnya setelah dunia mengalami krisis energi dan pangan global beberapa tahun lalu yang diikuti dengan perubahan iklim.

2.15 EPIDEMI

Dunia masih menghadapi epidemi beberapa penyakit infeksi yang berbahaya pada manusia. Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*/WHO) masih memberikan peringatan kepada dunia bahwa penyakit infeksi berbahaya bagi umat manusia masih belum sepenuhnya dapat diatasi, bahkan cenderung semakin meluas penyebarannya. Setiap tahun hampir ditemukan satu hingga tiga variasi penyakit infeksi pada manusia atau ditemukan penyakit lama yang muncul kembali. Ada kecenderungan bahwa penyakit infeksi pernapasan pada manusia bertambah dengan munculnya kasus-kasus, pada populasi, dan di kawasan baru.

SUMBER : GOOGLE

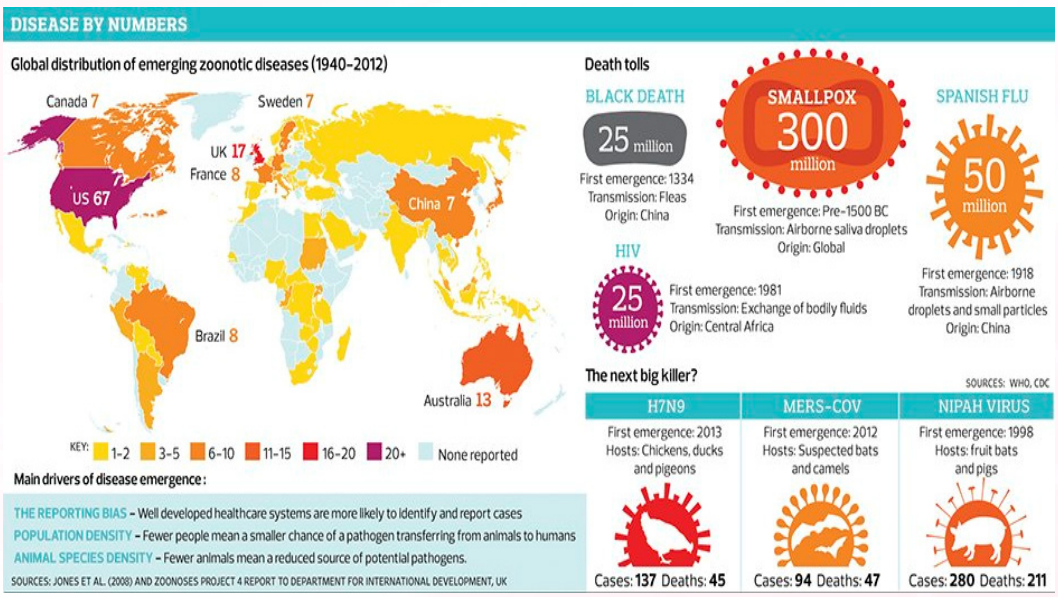

WHO telah mengumumkan sejumlah penyakit yang masih mengancam umat manusia. yaitu demam berdarah *(dengue fever)*, *tubercolosis* (TBC), *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (*HIV/AIDS*), penyakit sapi gila *(mad cow)* atau *Variant Creutzfeldt-Jakob Disease* (VCJD), H5N1 Influenza atau flu burung (*bird flu*), *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), H1N1 Influenza atau flu babi (*swine flu*), *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan H7N9 Influenza atau flu burung varian baru (*bird flu*). Secara geografis, kawasan Asia dan Sub-Afrika Sahara diidentifikasi oleh WHO sebagai wilayah yang rawan (*hot spot*) terhadap munculnya penyakit infeksi pernapasan yang berbahaya bagi manusia.

Indonesia sangat rawan pada ancaman epidemi penyakit pernapasan. Secara geografis, wilayah Indonesia yang sangat luas dan terbuka, menjadi akses lalu-lintas manusia dan barang yang relatif tidak dapat dikontrol dan diawasi secara efektif. Kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan apabila ada ancaman penyebaran penyakit, baik karena faktor alami maupun karena ada yang merencanakan (perang biologi). Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap ancaman epidemi antara lain pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti mobilitas penduduk yang tinggi karena kemajuan teknologi transportasi, perubahan penggunaan lahan, kontak yang lebih besar antara manusia dan hewan, perjalanan dan perdagangan internasional yang pesat, infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang masih belum baik, kesadaran akan kesehatan yang rendah, dan kemiskinan.

2.16 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN DAN KONTEKS STRATEGIS NASIONAL

Ideologi. Pengamalan ideologi Pancasila mengalami degradasi. Pancasila merupakan ideologi bangsa dan cita-cita negara yang menjadi basis tata sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia semakin dilupakan dan ditinggalkan. Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi acuan dan orientasi bangsa mengalami degradasi dalam implementasinya. Aksi kekerasan yang merajalela di masyarakat, hilangnya nilai-nilai Pancasila yang menekankan multikulturalitas, kebhinnekaan dan nilai keadilan dengan kecenderungan menguatnya ego kedaerahan (*ethno-nationalism*) merupakan indikasi menurunnya pemahaman terhadap ideologi negara. Penurunan pemahaman terhadap Pancasila serta terjadinya pengeroposan nilai-nilai Pancasila juga diakibatkan oleh aktivitas kelompok-kelompok radikal, baik secara terbuka maupun tertutup yang menggejala di dalam masyarakat.

Kondisi menggejalanya radikalisme melemahkan sifat kebhinnekaan dan rasa perdamaian serta melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai peristiwa kekerasan, kerusuhan dan konflik berlatar belakang suku, agama, ras dan antargolongan menandakan bahwa sebagian masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai toleransi, perdamaian, kemanusiaan, kemajemukan, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan yang terkandung di dalam Pancasila.

Politik. Kondisi politik nasional menghadapi sejumlah tantangan apabila ditinjau dari infrasruktur politik, suprastruktur politik, dan budaya politik. Pada tataran infrastruktur politik, perkembangan politik nasional masih diwarnai dengan isu persoalan proses hukum terutama yang berkaitan dengan masalah korupsi yang menyandera partai politik. Persoalan hukum yang dihadapi oleh partai politik ini, sering dijadikan sebagai *bargaining* politik oleh lawan politik. Persoalan korupsi menyebabkan sebagian partai politik dinilai belum mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan politik bagi rakyat dan sebagai lembaga penyeleksi kader pimpinan bagi masyarakat. Partai politik dinilai masih mengedepankan oligarki dan transaksional politik. Rakyat cenderung tidak mempercayai partai politik sebagai wahana berdemokrasi dan wahana agregasi kepentingan.

Pada tataran suprastruktur politik, terdapat kendala untuk mengembangkan komunikasi, kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap konstitusi dan produk-produk turunannya, sehingga wacana untuk mengevaluasi UUD 1945 sering mengemuka. Sementara pada tataran budaya politik, terdapat indikasi penurunan moral dan etika berpolitik pada kalangan elit politik, sehingga tidak pantas diteladani oleh sebagian besar rakyat.

Kondisi politik lokal masih diwarnai dengan beberapa permasalahan yang berpotensi konflik. Permasalahan yang banyak terjadi diantaranya ketidakpuasan publik terhadap hasil penghitungan suara dan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Masalah lain, terkait dengan adanya benturan kepentingan dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat karena terdapat kecenderungan tindakan kepala daerah lebih mengutamakan kepentingan daerah dibanding dengan kepentingan nasional. Masalah pemekaran wilayah juga masih mengemuka yang berpotensi timbulnya sengketa atas perbatasan wilayah dan akses ekonomi dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

SUMBER : GOOGLE

Persoalan pemekaran wilayah dan konflik kepentingan berpotensi terjadinya berbagai aksi kekerasan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional dan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Ekonomi. Perekonomian Indonesia masih akan mengalami tantangan. Perkembangan perekonomian dunia masih sangat dipengaruhi oleh ketidak pastian ekonomi global. Setelah mengalami pertumbuhan pesat beberapa tahun terakhir, sejumlah indikator menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang memasuki fase perlambatan. Penurunan nilai tukar rupiah menjadi salah satu penyebab turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah yang cenderung merosot menyebabkan biaya impor menjadi mahal.

Dengan impor yang terkendala, kegairahan investasi dan konsumsi pun terganggu. Di sisi lain, dampak kenaikan harga BBM masih terasakan. Inflasi yang relatif tinggi telah menurunkan daya beli masyarakat. Tekanan di sisi permintaan juga bertambah sebagai reaksi terhadap kebijakan di sektor moneter. Kenaikan tingkat bunga juga memberi efek negatif dalam dinamika di sisi konsumsi.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penyesuaian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tidak lebih baik dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya sesuai dengan kinerja perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut akan menurunkan nilai impor dan mempengaruhi iklim usaha terutama di sektor manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja. Apabila tekanan ekonomi global tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan gejolak sosial yang dapat berkembang menjadi konflik sosial dan politik.

Sosial Budaya. Kondisi sosial budaya bangsa Indonesia menghadapi tantangan pergeseran nilai nilai**.** Globalisasi serta *euphoria* reformasi yang sarat dengan semangat perubahan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial budaya bangsa.

SUMBER : GOOGLE

Perubahan yang mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan.

Produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dari luar membawa nilai-nilai tertentu yang secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Di tengah semakin kaburnya wujud dan bentuk ancaman yang berkembang dewasa ini, kerapuhan jiwa dan semangat kebangsaan merupakan potensi ancaman terbesar bagi keberlangsungan dan keutuhan bangsa. Degradasi pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika menghambat semangat dan kesadaran bela negara seluruh warga negara. Degradasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia telah mempengaruhi sifat nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang seharusnya berkobar dalam hati sanubari setiap warga negara Indonesia sebagai modal dasar dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.

Keamanan Dalam Negeri. Indonesia masih rawan terhadap konflik vertikal. Gerakan separatis masih menjadi isu keamanan dalam negeri yang mengancam keutuhan wilayah NKRI dan mengancam wibawa pemerintah serta keselamatan masyarakat. Gerakan separatis di Indonesia dilakukan dalam bentuk gerakan separatis politik dan gerakan separatis bersenjata.

Gerakan separatisme politik di luar negeri dilakukan dalam bentuk mendirikan perwakilan-perwakilan seperti di AS, Inggris, Australia, Belanda dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka mencari dukungan dari dunia internasional. Gerakan separatisme bersenjata walaupun masih dalam skala kecil namun sering menyebabkan terjadinya gangguan keamanan.

Gerakan separatis masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Gerakan separatis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Beberapa daerah di Indonesia yang pernah dilanda aksi separatisme masih memiliki residu yang berpotensi memunculkan kembali ide separatisme. Oleh karena itu, separatisme menjadi ancaman langsung terhadap keutuhan wilayah NKRI. Gerakan separatisme akan menimbulkan gangguan keamanan di dalam negeri, tidak saja mengancam keselamatan umum dan masyarakat tetapi juga terhadap kadulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI.

Indonesia masih rawan terhadap konflik horizontal. Konflik horizontal yang dipicu oleh karena ciri multikulturalitas masyarakat, keragaman suku bangsa, agama, etnis, golongan dan kondisi sosial masih akan mewarnai konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia masih terdapat sejumlah daerah tertinggal dan sebagian besar diantaranya dikatagorikan daerah rawan konflik.

Konflik horizontal juga sering dipicu oleh adanya ekses dari pembangunan, seperti sengketa lahan, penggusuran, tuntutan kenaikan upah kerja, dan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Konflik juga berpotensi ditimbulkan oleh ekses kegiatan berdemokrasi seperti Pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan anggota DPR/DPRD, karena hasil dan proses pemilihan yang dinilai tidak memenuhi asas-asas yang telah disepakati yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Serta adanya kecurigaan praktek politik uang (*money politics*) dan penyelewengan atau manipulasi hasil pemilihan.

SUMBER : GOOGLE

3. KERANGKA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA

3.1. UMUM

Strategi pertahanan negara dirumuskan dengan beberapa pertimbangan yang mendasar. Penyusunan strategi pertahanan negara dirumuskan sesuai dengan paham dan pandangan bangsa Indonesia dalam tiga substansi dasar secara proporsional, seimbang, dan terkoordinasi. Strategi pertahanan negara merumuskan tujuan, sasaran strategis, cara, serta sarana yang digunakan untuk terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi.

3.1.1 Strategi Pertahanan Negara dirumuskan sesuai paham dan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Strategi Pertahanan Negara dipersiapkan dan diimplementasikan dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya upaya pihak manapun yang mengancam eksistensi kemerdekaan. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha secara damai tidak berhasil.

3.1.2 Strategi Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan tiga elemen dasar yang menyertainya. *Pertama*, membentuk (*to shape*), yaitu suatu strategi yang mampu menciptakan dan membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional dengan mempromosikan stabilitas kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman, mencegah konflik, dan mencegah agresi dan tindakan kekerasan lainnya. *Kedua*, merespon (*to respond*), yaitu strategi yang mampu merespon berbagai spektrum krisis yang dapat menciptakan ancaman dan risiko terhadap kepentingan nasional.

Ketiga, menyiapkan (*to prepare*), yaitu strategi yang mampu mempersiapkan suatu pertahanan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan memusatkan diri pada upaya pembangunan kekuatan, pengembangan konsep, dan pengorganisasian pertahanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional.

3.1.3 Strategi Pertahanan Negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar suatu strategi secara proporsional, seimbang, dan terkoordinasi. *Pertama*, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa yang dijabarkan menjadi empat sasaran strategis (*ends)*. *Kedua*, apa sumber daya yang digunakan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (*means*), yakni mengerahkan pertahanan militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan pertahanan nirmiliter. *Ketiga,* bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dipertahankan (*ways*), yakni dengan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Cara ini diwujudkan dengan menyusun pertahanan yang defensif aktif, bersifat semesta dan disusun secara berlapis, didukung oleh kemampuan untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia dan kemandirian industri pertahanan yang kuat dan mandiri serta dengan mengerahkan elemen-elemen kekuatan nasional secara bersinergi dan terpadu.

THE LYKKE MODEL

Apabila ketiga substansi dasar tersebut tidak proporsional, tidak seimbang, dan tidak terkoordinasi maka akan terjadi suatu risiko (*risk*) karena terjadi kesenjangan antara tujuan atau sasaran yang ingin dicapai (*ends*), kemampuan dan kekuatan sumber daya yang tersedia (*means*), dan konsep bertindak strategis yang dipilih (*ways*).

3.2 TUJUAN PERTAHANAN NEGARA DAN SASARAN STRATEGIS

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat sasaran strategis yang saling terkait. *Pertama*, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer. *Kedua*, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman non militer. *Ketiga,* terselenggaranya pertahanan negara yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional. *Keempat,* terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri.

Terselenggaranya Pertahanan Negara yang Mampu Menghadapi Ancaman Militer

Untuk menjamin eksisitensi NKRI, diperlukan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang dapat menghancurkan dan melenyapkan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ancaman militer bersifat fisik dan dapat berbentuk agresi maupun bukan agresi. Ancaman militer berbentuk agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman militer berbentuk bukan agresi merupakan ancaman militer yang berskala terbatas sehingga ditangani dengan pendekatan tertentu yang berbeda dengan pendekatan untuk melawan agresi militer suatu negara. Sesuai dengan hakikat ancaman militer dan konsekuensinya, maka sangat penting untuk mempersiapkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman militer.

Terselenggaranya Pertahanan Negara yang Mampu Menghadapi Ancaman Nonmiliter

Untuk menjamin keutuhan NKRI, diperlukan pertahanan yang mampu mengatasi ancaman nonmiliter. Walaupun tidak secara langsung mengancam eksisitensi NKRI, namun ancaman non militer dapat mengganggu dan melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman nonmiliter tidak berbentuk fisik sehingga tidak dapat ditangani secara langsung dengan menggunakan pendekatan kekuatan pertahanan yang bersifat *hard-power*. Ancaman nonmiliter tersebut pada dimensi tertentu dapat berakumulasi dan mengancam kepentingan nasional, bahkan mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

Kepentingan nasional dan eksistensi bangsa dan negara harus terlindungi dari ancaman nonmiliter. Apabila ancaman nonmiliter tidak ditangani secara proporsional maka akan timbul risiko besar yang mengancam eksistensi NKRI. Ancaman nonmiliter terkait dengan stabilitas nasional sehingga sangat mendasar untuk ditempatkan sebagai salah satu sasaran pertahanan negara.

Terselenggaranya Pertahanan Negara yang Mampu untuk Ikut Serta Mewujudkan Perdamaian Dunia dan Stabilitas Regional

Keikutsertaan Indonesia dalam perdamaian dunia dan menjaga stabilitas regional merupakan bentuk upaya untuk meniadakan atau mengurangi ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara. Ancaman terhadap eksistensi NKRI dapat ditiadakan atau dikurangi apabila dapat dibentuk suatu lingkungan keamanan strategis yang stabil dan kondusif. Dunia yang aman dan damai serta lingkungan regional yang stabil merupakan kepentingan nasional Indonesia yang diperjuangkan sepanjang waktu. Indonesia tidak ingin berada dalam lingkungan global dan regional yang diwarnai oleh konflik yang berkecamuk. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perdamaian dunia belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Di sejumlah kawasan masih terdapat konflik antarnegara dan bentuk-bentuk penindasan yang harus ditangani secara bermartabat. Indonesia perlu mengembangkan kerja sama pertahanan negara dengan negara lain sebagai wadah untuk bersama-sama dengan negara lain mempromosikan pandangan dan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.

Dunia yang damai dan stabil akan mengurangi potensi konflik antar negara. Tumbuhnya rasa saling mempercayai antara negara-negara di dunia akan membantu menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas kawasan. Terwujudnya perdamaian dunia dan stabilitas kawasan akan mengurangi potensi konflik antar negara. Kondisi tersebut memberikan kontribusi penting bagi keberhasilan terselenggaranya pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer maupun ancaman nonmiliter.

Terselenggaranya Pertahanan Negara yang Didukung oleh Industri Pertahanan yang Kuat dan Mandiri.

Penyelenggaraan pertahanan negara yang kuat perlu mendapat dukungan dari industri pertahanan yang kuat dan mandiri. Dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia serta untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI perlu dilaksanakan suatu sistem pertahanan negara kuat dan handal. Kemampuan penyelenggaraan pertahanan negara yang kuat dan handal untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter memerlukan dukungan alat utama sistem senjata (alutsista) yang tidak saja canggih, tetapi juga *sustainable*. Untuk memenuhi kebutuhan alutsista tersebut diperlukan industri pertahanan yang kuat dan mandiri.

3.3 SUMBER DAYA PERTAHANAN

Strategi Pertahanan Negara diimplementasikan dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional. Untuk mendukung implementasi Strategi Pertahanan Negara, seluruh sumber daya nasional dikerahkan setelah melalui suatu proses transformasi untuk mengubah potensi sumber daya nasional (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, geografi, demografi dan sumber daya alam) menjadi elemen-elemen kekuatan nasional (*elements of national power*).

Elemen-elemen kekuatan nasional terdiri dari beberapa unsur. *Pertama*, kekuatan nirmiliter (*non-military power*) yang meliputi kekuatan ideologi, politik dalam negeri dan diplomasi, ekonomi dan keuangan, sosial budaya, teknologi, psikologi, informasi, geografi, demografi dan sumberdaya alam. *Kedua*, kekuatan militer (*military power*) yang terdiri dari elemen kekuatan darat (*land power*), elemen kekuatan laut (*sea power*), dan elemen kekuatan udara (*air power*), yang diperkuat dengan kekuatan cadangan dan pendukung.

Kekuatan darat (*land power*) merupakan totalitas dan sinergitas kemampuan dan kekuatan nasional riil di darat. Kekuatan darat meliputi kekuatan angkatan darat, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, mobilisasi, teknologi, industri nasional, wilayah darat, sumber daya dan masyarakat yang dapat dikerahkan untuk mempengaruhi pertempuran di darat. Kekuatan darat diproyeksikan untuk mengontrol penggunaan wilayah darat demi kepentingan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Kekuatan darat tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan laut dan kekuatan udara.

Kekuatan laut (*sea power*) merupakan totalitas dan sinergitas kemampuan dan kekuatan nasional riil di laut. Kekuatan laut meliputi kekuatan angkatan laut, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, mobilisasi, teknologi, industri nasional, wilayah laut, sumber daya dan masyarakat maritim yang dapat dikerahkan untuk mempengaruhi pertempuran di laut. Kekuatan laut diproyeksikan untuk mengontrol penggunaan wilayah laut (sea control) demi kepentingan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Kekuatan laut juga dikerahkan untuk mengontrol perdagangan dan perniagaan di laut, serta untuk kepentingan penangkalan (*deterence*), penolakan di laut (sea denial), diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*) dan memberikan pengaruh politik dalam masa damai. Kekuatan laut dapat dikerahkan untuk membantu mempengaruhi pertempuran di darat dan di udara. Kekuatan laut tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan udara dan kekuatan darat.

Kekuatan udara (*air power*) merupakan totalitas dan sinergitas kemampuan dan kekuatan nasional riil di udara. Kekuatan udara meliputi kekuatan angkatan udara, kekuatan berbagai satuan dan organisasi, mobilisasi, teknologi, industri nasional, wilayah udara nasional dan masyarakat dirgantara yang dapat dikerahkan untuk mempengaruhi pertempuran di udara.

Kekuatan udara diproyeksikan untuk menguasai wilayah udara dalam rangka kepentingan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Kekuatan udara dikerahkan untuk membantu mempengaruhi pertempuran di darat dan di laut melalui keunggulan di udara (*air supremacy*). Kekuatan udara tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan darat dan kekuatan laut. Kekuatan udara digunakan juga untuk mendukung strategi penolakan (*deterrence*) dan diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*).

Elemen-elemen kekuatan nasional dikerahkan secara bersinergi dan dikelompokkan ke dalam bentuk kekuatan lunak (*soft power*) dan kekuatan keras (*hard power*) dan kekuatan yang cerdas (*smart power*) untuk mendukung upaya pertahanan negara.

Potensi sumber daya nasional yang ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan negara digunakan untuk penyelenggaraan pertahanan negara. Sumber daya pertahanan negara bertumpu pada sumber daya pertahanan militer dan sumber daya pertahanan nirmiliter.

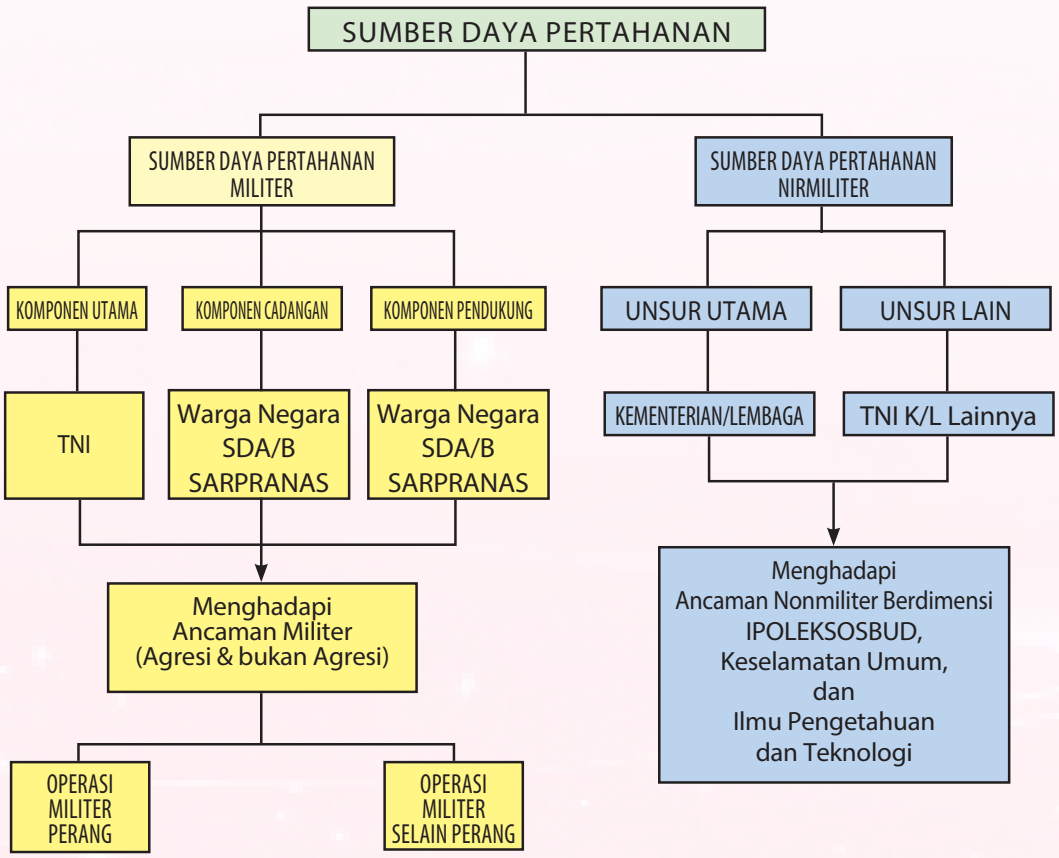

3.3.1 SUMBER DAYA PERTAHANAN MILITER

Sumber Daya Pertahanan Militer bertumpu pada TNI sebagai Komponen Utama didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer. Dalam pembangunan sumber daya pertahanan militer mengacu kepada kebijakan pembangunan postur kekuatan pokok minimal *(Minimum Essential Force)* militer yang terdiri dari SDM, alutsista, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran.

Dalam pertahanan militer, TNI sebagai lapis utama melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

OMP dilaksanakan untuk menghadapi ancaman agresi militer, berupa invasi, bombardemen, blokade, serangan unsur angkatan bersenjata negara lain, unsur kekuatan bersenjata negara lain dalam wilayah NKRI yang bertentangan dengan perjanjian, tindakan suatu negara yang mengijinkan penggunaan wilayahnya untuk melakukan agresi, dan kelompok bersenjata atau tentara bayaran yang dikirim oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan.

OMSP dilaksanakan untuk menghadapi ancaman militer bukan agresi, berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam OMSP, TNI melaksanakan kegiatan dan operasi untuk menghadapi ancaman meliputi: separatisme bersenjata, pemberontakan bersenjata, terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas Kamtibmas yang diatur dalam Undang-Undang, membantu mengamankan tamu negara, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (SAR) dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Tugas perbantuan dilakukan TNI sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam membantu Unsur Utama sesuai kebijakan dan keputusan politik negara untuk menghadapi ancaman nonmiliter.

Komponen Cadangan terdiri atas warga negara, Sumber Daya alam dan buatan (SDA/B), sarana prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, Sumber Daya alam dan buatan (SDA/B), sarana prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

SUMBER : GOOGLE

3.3.2 SUMBER DAYA PERTAHANAN NIRMILITER

Sumber daya pertahanan nirmiliter bertumpu pada peran serta Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dibantu oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Dalam pembangunan sumber daya pertahanan nirmiliter memperhatikan pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam bela negara.

Bentuk ancaman nonmiliter meliputi ancaman yang berdimensi idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, ancaman yang berdimensi keselamatan umum.

Keterlibatan warga negara dalam pertahanan nirmiliter disesuaikan dengan profesi, pengetahuan dan keahliannya di Kementerian/Lembaga dengan memberdayakan sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Pengintegrasian pertahanan nirmiliter dilaksanakan dalam dua bentuk pengabdian secara proposional, yaitu antara pengabdian pada profesi dan pengabdian pada kepentingan pertahanan negara.

SUMBER: KEMHAN RI

3.4 CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS

3.4.1 MEMPERSIAPKAN PERTAHANAN YANG BERSIFAT SEMESTA

Pertahanan dalam sifat kesemestaan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Upaya pertahanan negara tersebut didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, keyakinan pada kekuatan sendiri, kegotongroyongan, pantang menyerah, *interoperability,* keterpaduan, totalitas, dan kebersamaan. Sifat kesemestaan dimanifestasikan dalam kesatuan cara berpikir dan cara bertindak warga negara Indonesia untuk terlibat dalam usaha-usaha pertahanan negara. Kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara ditujukan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pertahanan bersifat semesta dilaksanakan dengan melibatkan pertahanan militer dan nirmiliter secara sinergi, terintegrasi, dan terkoordinasi untuk menghadapi setiap bentuk ancaman.

Pertahanan bersifat semesta diimplementasikan secara dinamis sesuai dengan hakikat ancaman. Ancaman dan tantangan terhadap pertahanan negara, tidak lagi didominasi oleh ancaman militer, tetapi juga oleh ancaman nonmiliter. Dimensi ancaman mudah berkembang dari satu dimensi ke dimensi lain secara simultan, termasuk dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi informasi. Sifat, sumber, dimensi dan spektrum ancaman yang kompleks, sulit diprediksi, mudah berubah, dan tidak jelas harus dihadapi oleh semua elemen kekuatan nasional.

Sifat kesemestaan merupakan konsekuensi dari upaya mempertahankan dan melindungi keselamatan negara dan bangsa. Seluruh bangsa Indonesia harus memandang serangan dari negara lain sebagai ancaman terhadap seluruh bangsa tanpa terkecuali. Kesengsaraan dan kehancuran suatu negara akibat perang tidak hanya berakibat pada militer semata, Rakyat juga akan merasakan akibat perang yang menghancurkan. Dalam kebersamaan, peran rakyat sangat penting untuk menentukan kekuatan semangat atau moral angkatan perang sebaliknya militer harus dapat melindungi rakyat dari segenap bentuk kesengsaraan dan kehancuran.

Kemanunggalan TNI dan Rakyat merupakan modal penting dalam upaya pertahanan negara yang bersifat semesta. Dalam pertahanan yang bersifat semesta, upaya pertahanan negara diselenggarakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan nirmiliter secara bersinergi.

Kekuatan pertahanan militer menempatkan TNI, yang pada hakikatnya berasal dari rakyat, sebagai Komponen Utama. Sementara komponen lainnya yaitu Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang berasal dari rakyat, dipersiapkan secara dini dan dimobilisasi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ditujukan untuk memperkuat Komponen Utama. Demikian juga kekuatan pertahanan nirmiliter yang menempatkan Kementerian dan Lembaga sebagai Unsur Utama maupun sebagai unsur bantuan, pada hakikatnya merupakan perwujudan kekuatan rakyat yang telah dilembagakan sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian sinergitas antara kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan nirmiliter, pada dasarnya dijiwai oleh semangat kemanunggalan dua kekuatan yaitu kekuatan militer dalam hal ini TNI dan kekuatan rakyat.

Upaya pertahanan militer dilaksanakan oleh Komponen Utama, didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung untuk menghadapi ancaman militer yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan segenap bangsa.

Upaya pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh seluruh kekuatan bangsa di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dan unsur-unsur kekuatan bangsa lainnya termasuk militer sebagai Unsur Bantuan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman. Pertahanan nirmiliter dikerahkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan segenap bangsa.

Pertahanan nirmiliter diselenggarakan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Ketika masa damai, penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dapat digunakan sebagai kekuatan nasional pada masa perang. Ketika masa perang, pertahanan nirmiliter dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuan masyarakat serta segenap Sumber Daya Nasional (SDN) dalam mendukung upaya memenangkan perang.

Pertahanan semesta pada prinsipnya diselenggarakan di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia menjadi mandala perang yang dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi beberapa mandala sesuai dengan hakikat dan intensitas ancaman. Setiap mandala menjadi ruang penyelenggaraan pertahanan negara yang disesuaikan dengan karakteristik geografi Indonesia yang bercirikan negara kepulauan (*archipelagic state*).

3.4.2 MEMPERSIAPKAN PERTAHANAN DEFENSIF AKTIF

Pertahananan defensif aktif merupakan pertahanan yang bersifat tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Pertahanan negara diselenggarakan sesuai dengan paham bangsa Indonesia yang memegang prinsip cinta damai, tetapi tetap menjunjung tinggi usaha mempertahankan kedaulatan. Perang adalah cara terakhir setelah diplomasi dan politik menemui jalan buntu. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara yang bersifat defensif tidak akan digunakan untuk menyerang kedaulatan negara lain. Kekuatan pertahanan negara bersifat aktif dalam mencegah dan menangkal setiap bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Kekuatan militer untuk pertahanan defensif aktif dibangun agar mempunyai kemampuan yang berdaya tangkal tinggi sehingga disegani oleh negara lain.

Pertahanan defensif aktif diwujudkan dengan mengedepankan diplomasi sebagai lini pertahanan negara terdepan. Perang harus dapat dicegah dengan pendekatan politik persuasif dengan mengintensifkan usaha-usaha diplomatik. Dalam sistem pertahanan, diplomasi dikembangkan secara efektif untuk mencegah niat negara lain menyerang Indonesia atau mengancam kepentingan nasional Indonesia.

Usaha-usaha diplomasi berintikan peran pertahanan nirmiliter yang dilakukan melalui pendekatan politik dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter lainnya dikerahkan untuk memperkuat upaya diplomasi, sekaligus melakukan tahapan lanjutan apabila diplomasi mengalami jalan buntu. Keberhasilan usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi politik dan komunikasi strategis yang diperankan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni pengemban politik luar negeri.

Pertahanan defensif aktif dalam menghadapi ancaman nonmiliter dilakukan K/L di luar bidang pertahanan melalui penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan. Proses penyiapan wilayah negara sebagai medan pertahanan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, antar lembaga dan instansi, yang diwujudkan melalui penataan kawasan ruang pertahanan. Selain hal tersebut K/L menyiapkan logistik pertahanan secara dini dan terpadu dengan pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan.

Pertahanan defensif aktif diwujudkan dengan membangun kemitraan global. Kompleksitas hubungan internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik, bagi Indonesia sangat penting untuk mengedepankan semangat kebersamaan antarnegara. Indonesia berada pada posisi untuk mendorong tercapainya stabilitas bersama, keamanan bersama, dan kemakmuran bersama. Untuk menyikapi perubahan konstelasi kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik, Indonesia melakukan kebijakan mewujudkan keseimbangan yang dinamis (*dynamic equilibrium),* yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan. Hal tersebut dilakukan atas dasar keyakinan bahwa kemajuan sebuah negara bukannya ancaman bagi negara lain, melainkan merupakan peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan.

Pertahanan defensif aktif didukung oleh peran Indonesia yang akan senantiasa mengambil bagian untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam usaha untuk mencegah dan mengatasi konflik di berbagai kawasan. Keberadaan pasukan Indonesia (TNI) merupakan peran penting sebagai mitra strategis masyarakat internasional dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas global. Tugas untuk menjaga perdamaian dunia diemban oleh TNI melalui pembentukan pasukan pemelihara perdamaian maupun pengamat perdamaian. TNI turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PBB.

3.4.3 MENYUSUN PERTAHANAN BERLAPIS

Pertahanan berlapis dilaksanakan secara komprehensif, integral dan holistik untuk mampu menghadapi dinamika pola ancaman yang luas dan lengkap, secara terpadu dan tidak terpisahkan satu sama lain saling berkaitan dalam satu sistem yang dinamis dan nonlinier.

Karakteristik ancaman dan tantangan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa, sangat sulit diprediksi. Ancaman yang cenderung asimetris pada semua aspek kehidupan dapat datang dari dalam negeri dan luar negeri atau kombinasi secara simultan antara ancaman dari dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu, pertahanan negara dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang dinamis dan nonlinier. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Strategi Pertahanan berlapis diimplementasikan dan dikembangkan dengan maksud untuk menangkal, mengatasi, dan menanggulangi ancaman militer dan ancaman nonmiliter, serta melaksanakan perang berlarut.

Strategi Pertahanan Negara diimplementasikan dalam strategi pertahanan berlapis yang menyinergikan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter. Strategi pertahanan berlapis merupakan implementasi dari pertahanan bersifat defensif aktif dan semesta, bertumpu pada upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan saling menyokong. Keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter diharapkan menghasilkan daya tangkal yang andal dan tangguh dalam mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman dan tantangan.

Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang didukung kekuatan cadangan dan kekuatan pendukung melalui mobilisasi guna menghadapi ancaman militer baik agresi maupun bukan agresi diselenggarakan melalui pola OMP maupun OMSP.

Sedangkan pertahanan nirmiliter merupakan fungsi utama penggunaan kekuatan dan kemampuan masyarakat dan segenap Sumber Daya Nasional (SDN) sebagai fungsi pertahanan sipil yang didukung unsur lain, baik dari TNI maupun K/L untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Pertahanan nirmiliter merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional.

SUMBER : GOOGLE

3.4.3.1 PENANGKALAN

Penangkalan merupakan strategi pertahanan negara yang paling fundamental. Penangkalan yang andal mencegah terjadinya perang. Perang pada dasarnya terjadi sebagai akibat kegagalan usaha pertahanan negara dan kegagalan diplomasi untuk mencegahnya. Tidak ada negara yang menghendaki terjadinya perang. Perang selalu mendatangkan malapetaka bagi umat manusia. Dengan demikian, setiap negara akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya perang. Kemampuan suatu negara untuk mengembangkan penangkalannya akan mencegah negara tersebut dari malapetaka, penderitaan, dan kehancuran. Penangkalan merupakan pilihan dalam upaya pertahanan sehingga daya tangkal harus dibangun dan dikembangkan sejak dini dan berkesinambungan.

Pada masa damai, pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa dan negara yang tangguh. Strategi Pertahanan berlapis dalam kerangka penangkalan, diwujudkan melalui pemberdayaan dan pendayagunaan segenap sumber daya nasional secara maksimal, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan penangkalan.

Pertahanan militer dibentuk dan dibangun sebagai kekuatan militer yang diwujudkan dalam bentuk kualitas SDM yang memiliki kompetensi tinggi, profesional serta didukung kekuatan Alutsista yang modern guna mencapai standar penangkalan yang diinginkan. Standar kekuatan yang disegani pada lingkup regional merupakan standar kekuatan minimal yang disegani dihadapkan dengan hakikat ancaman dan permasalahan di lingkup regional khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Pertahanan nirmiliter merupakan kekuatan yang dalam kerangka penangkalan yang dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan teknologi. Pemberdayaan dan pendayagunaan Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter pada masa damai, selain untuk tujuan penangkalan, juga diarahkan untuk memberikan efek stabilitas yang memungkinkan pembangunan nasional dapat terselenggara untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi.

Strategi Pertahanan berlapis dalam kerangka penangkalan diwujudkan melalui pemberdayaan dan pendayagunaan segenap sumber daya nasional. Seluruh sumber daya nasional diberdayakan dan didayagunakan secara maksimal, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter, sebagai satu kesatuan penangkalan. Penangkalan dilaksanakan dengan mengerahkan seluruh elemen kekuatan negara yang saling mendukung dan saling memperkuat. Instrumen negara meliputi kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan militer.

Keberhasilan penangkalan dapat terlihat apabila pihak yang mempunyai niat menyerang Indonesia mengurungkan niatnya. Selain melalui pengerahan Instrumen penangkalan, untuk mencapai keberhasilan penangkalan, strategi penangkalan dikembangkan melalui strategi penangkalan dengan cara penolakan atau penangkalan dengan cara pembalasan.

3.4.3.1.1 INSTRUMEN PENANGKALAN

INSTRUMEN IDEOLOGI

Instrumen ideologi merupakan salah satu pilar utama penopang negara guna menghadapi ancaman berdimensi ideologi. Karakteristik masyarakat Indonesia yang multietnis, ras, agama, bahasa, aliran, budaya dan kepentingan memerlukan ideologi yang bersifat terbuka dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat guna keberlangsungan hidup bangsa. Penetrasi ancaman militer dan nonmiliter baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri terhadap ideologi negara dapat berakibat terganggunya berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berimplikasi terhadap eksistensi kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Pancasila merupakan instrumen ideologi yang fundamental, berlaku sama untuk menghadapi ancaman militer dan nonmiliter. Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu dan penjamin stabilitas dan keberlangsungan bangsa, direvitalisasi guna menata sendi-sendi dasar penyelenggaraan negara.

Kekuatan ideologi negara diarahkan untuk membentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penjabaran nilai-nilai intrinsik menjadi nilai-nilai praksis. Penyelenggaraan pencerahan nilai-nilai praksis Pancasila dilaksanakan secara formal, maupun informal agar dicapai hasil yang optimal.

INSTRUMEN POLITIK

Instrumen politik merupakan salah satu pilar utama penopang negara guna menghadapi ancaman berdimensi politik. Instrumen politik merupakan bagian penting dari kekuatan pertahanan nirmiliter dalam upaya pertahanan negara. Upaya politik sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik antarnegara. Instrumen politik menghasilkan kekuatan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara.

Pada tataran internasional, penangkalan dilaksanakan melalui diplomasi yang efektif. Diplomasi yang efektif dilaksanakan dengan beberapa cara. *Pertama*, membentuk pemerintahan sipil yang sah, bersih, dan berwibawa, yang mampu mengelola pemerintahan secara efektif, demokratis, dan bertanggung jawab, serta reputasi dan kredibilitasnya diakui masyarakat internasional. *Kedua*, mewujudkan sistem pembangunan nasional yang berkembang secara dinamis dengan hasil-hasil pembangunan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Ketiga*, menjaga stabilitas nasional yang kokoh di segala bidang dan ditopang oleh kinerja penegakan hukum yang meningkat. *Keempat,* mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, kuat dan disegani, baik di kawasan regional maupun internasional. *Kelima,* meningkatkan kualitas para pelaku fungsi diplomasi yang kredibel dan memiliki reputasi internasional.

Penangkalan dari aspek politik dilaksanakan dengan mempromosikan stabilitas keamanan regional dan perdamaian dunia. Setiap potensi konflik di kawasan yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dicegah melalui serangkaian kebijakan politik luar negeri yang mengedepankan upaya perwujudan kesadaran setiap negara untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain dalam rangka menghadapi berbagai tantangan, baik militer maupun nonmiliter. Hubungan baik antarnegara dijalin dengan prinsip dasar saling menghormati dan menghargai untuk menciptakan kawasan yang aman, stabil, dan makmur melalui arsitektur keamanan kawasan yang disepakati. Arsitektur kawasan tersebut harus terbuka, berbasis dialog, menghormati keberagaman, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Penangkalan aspek politik dilaksanakan dengan memperkuat dan mengembangkan Diplomasi Pertahanan. Diplomasi pertahanan dikembangkan untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Diplomasi pertahanan dilaksanakan melalui kerja sama militer dengan angkatan bersenjata negara-negara sahabat dalam bidang pendidikan, latihan bersama, pertukaran personel, dan kegiatan kunjungan dalam rangka mewujudkan *Confidence Building Measures* (CBM).

INSTRUMEN EKONOMI

Instrumen ekonomi merupakan salah satu pilar utama penopang negara guna menghadapi ancaman berdimensi ekonomi. Instrumen Ekonomi merupakan pilar negara dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan, industri, moneter, fiskal, dan perdagangan. Dalam kerangka pertahanan negara, instrumen ekonomi diberdayakan melalui optimalisasi peran lembaga/Institusi dan pelaku ekonomi guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan daya tangkal perekonomian nasional yang tangguh.

Ketahanan ekonomi nasional yang kuat akan mendukung kebijakan ekonomi bidang pertahanan dalam penyelenggaraan pertahanan militer. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara perlu didukung kekuatan dan kebijakan ekonomi nasional. Stabilitas pertumbuhan ekonomi makro nasional dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. PDB merupakan sumber kekuatan ekonomi nasional yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara.

Untuk menghadapi ancaman non militer bidang ekonomi di era perdagangan bebas, maka ketahanan ekonomi nasional diwujudkan melalui upaya akselerasi pembangunan perekonomian nasional yang memiliki daya saing, infrastruktur ekonomi yang mendukung kelancaran distribusi logistik dan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi berbasis pada pilar ekonomi kerakyatan. Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi mengembangkan pilihan strategis untuk membantu Unsur Utama pertahanan nirmiliter.

INSTRUMEN SOSIAL BUDAYA

Instrumen sosial budaya merupakan salah satu pilar utama penopang negara guna menghadapi ancaman berdimensi sosial budaya. Instrumen sosial budaya dibangun dan dikembangkan agar memiliki kemampuan daya tangkal terhadap ancaman nonmiliter. Kemampuan daya tangkal instrumen sosial budaya diarahkan untuk mengatasi permasalahan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Upaya yang ditempuh melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dengan cara peningkatan kualitas pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan penegakan hukum, dan kepemimpinan yang dapat diteladani dalam rangka membentuk karakter bangsa.

Pengaruh globalisasi menimbulkan berbagai masalah terhadap eksistensi kebudayaan, antara lain terjadinya penurunan rasa cinta terhadap kebudayaan, erosi nilai-nilai budaya, akulturasi budaya, dan klaim budaya oleh negara lain. Penangkalan terhadap eksistensi kebudayaan dilakukan dengan mematenkan, mempertunjukkan kesenian budaya lokal di forum internasional dan menanamkan sendi-sendi kebudayaan di dalam diri bangsa.

INSTRUMEN TEKNOLOGI

Instrumen teknologi merupakan salah satu pilar utama penopang negara guna menghadapi ancaman berdimensi teknologi. Perwujudan daya tangkal bangsa dalam bidang teknologi dilakukan untuk memiliki penguasaan teknologi dan kemandirian industri pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemandirian industri pertahanan diwujudkan secara bertahap melalui kerja-sama antara pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan alutsista produksi dalam negeri.

Daya tangkal di bidang teknologi dilakukan dengan membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mendukung tercapainya kemajuan teknologi alat peralatan pertahanan sesuai perkembangan zaman. Penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan daya tangkal bangsa dapat diperoleh juga melalui industri manufaktur (Penanaman Modal Asing/PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN), dengan secara bertahap mewajibkan penggunaan komponen lokal lebih banyak dari pada komponen impor.

INSTRUMEN MILITER

Instrumen militer merupakan salah satu pilar utama penopang negara guna menghadapi ancaman berdimensi milliter. Instrumen militer adalah instrumen utama kekuatan nasional dalam rangka mendukung kepentingan nasional bersama-sama dengan instrumen lainnya. Apabila cara-cara nirmiliter gagal melindungi kepentingan nasional, sebagai langkah terakhir digunakan kekuatan militer. Penggunaan kekuatan militer sebagai jalan terakhir merupakan filosofi bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Pelaksanaan diplomasi akan efektif bila didukung oleh kekuatan militer yang kuat.

Dalam pola defensif aktif, kekuatan militer dibangun untuk mempunyai kemampuan yang berdaya tangkal memadai sehingga disegani oleh negara lain. Kekuatan militer dibangun untuk memiliki mobilitas yang tinggi *(high mobility),* daya pukul *(striking force)* dan personel yang memiliki militansi. Pembangunan kemampuan militer tersebut dilakukan melalui kebijakan pembangunan postur kekuatan pokok minimal *(Minimum Essential Force)* militer, selain atas dasar pertimbangan kemampuan ekonomi negara, juga atas analisis risiko kemungkinan ancaman terhadap NKRI.

3.4.3.1.2 PENANGKALAN DENGAN CARA PENOLAKAN

Penangkalan dengan cara penolakan pada dasarnya merupakan daya tangkal yang dihasilkan oleh kekuatan pertahanan yang memiliki efek cegah tangkal sehingga pihak lawan membatalkan niatnya untuk menyerang Indonesia. Kekuatan pertahanan negara yang terdiri dari pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dibangun untuk memiliki kemampuan penangkalan dengan cara penolakan pola pendekatan yang digunakan melalui pengembangan kemampuan pertahanan yang integratif dalam sistem pertahanan semesta yang dibangun secara ideal.

Pertahanan militer untuk penangkalan dengan cara penolakan diwujudkan dengan membangun kekuatan pertahanan militer yang ideal berbasis alutsista yang modern.

Pertahanan nirmiliter untuk penangkalan dengan cara penolakan diwujudkan dengan menggalakkan pembangunan nasional yang berkelanjutan khususnya di sektor pendidikan nasional, ekonomi, dan industri.

3.4.3.1.3 PENANGKALAN DENGAN CARA PEMBALASAN

Penangkalan dengan cara pembalasan ditujukan agar kekuatan pertahanan negara memiliki kemampuan yang kuat untuk upaya balas terhadap lawan yang menduduki wilayah Indonesia. Penangkalan dengan cara pembalasan dikembangkan karena konsep pembangunan pertahanan militer berbasis alutsista secara ideal belum dapat diwujudkan.

Untuk mempertahankan eksistensi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI setelah semua usaha pertahanan mengalami kegagalan dilaksanakan dengan cara perang berlarut.

Pertahanan militer untuk penangkalan dengan cara pembalasan diwujudkan dengan mempersiapkan kemampuan gerilya modern, militan serta didukung oleh rakyat dan teknologi pertahanan untuk melakukan perang berlarut.

Pertahanan nirmiliter untuk penangkalan dengan cara pembalasan diwujudkan dengan menempatkan K/L di luar bidang pertahanan untuk menyiapkan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya secara dini sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung perang berlarut.

3.4.3.2 MENGHADAPI ANCAMAN MILITER

Strategi pertahanan berlapis dalam menghadapi ancaman militer dilakukan secara efektif untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa NKRI dengan segala kepentingannya. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, bentuk, dan besarnya ancaman aktual yang mengancam Indonesia. Dalam menghadapi ancaman agresi, strategi yang digunakan melibatkan segenap kekuatan pertahanan secara total. Dalam menghadapi ancaman militer bukan agresi, penggunaan kekuatan pertahanan negara disesuaikan dengan eskalasi ancaman serta tingkat risiko yang ditimbulkannya.

3.4.3.2.1 MENGHADAPI ANCAMAN MILITER AGRESI

Ancaman militer agresi terdiri dari beberapa bentuk. Bentuk-bentuk ancaman agresi antara lain Invasi, Bombardemen, Blokade, Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, satuan laut atau satuan udara TNI, Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, Tindakan suatu negara yang mengijinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap NKRI, Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI. Untuk menghadapi ancaman agresi, seluruh kekuatan nasional dikerahkan secara total, terpadu dan saling memperkuat dan disusun secara mendalam melalui usaha-usaha diplomasi, pengerahan pertahanan militer, dan penyiapan untuk perang berlarut.

SUMBER : GOOGLE

Ancaman militer agresi dihadapi dengan menyinergikan kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan nirmiliter. Kekuatan pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer agresi dilakukan dengan strategi pengerahan kekuatan militer secara terpadu (Tri Matra Terpadu). Pertahanan militer disiapkan untuk melakukan tindakan apabila diplomasi mengalami kegagalan.

Kekuatan pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman militer agresi dilakukan dengan melaksanakan langkah diplomasi sebagai bentuk pertahanan berlapis untuk memberikan kedalaman upaya pertahanan negara. K/L menyiapkan elemen-elemen Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang siap dimobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama.

SUMBER : GOOGLE

LAPIS DIPLOMASI

Lapis diplomasi mengedepankan usaha-usaha untuk mengatasi perselisihan atau konflik dengan negara lain. Kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dijaga dan dilindungi dengan membangun komitmen yang kuat. Ancaman militer dari negara lain dilakukan dengan membangun dan mengembangkan strategi pertahanan defensif aktif. Pertahanan defensif aktif dilakukan dengan diplomasi sebagai lini pertahanan negara terdepan.

Pertahanan militer untuk mendukung lapis diplomasi dilakukan dengan langkah diplomasi pertahanan untuk membangun rasa saling percaya (*Confidence Building Measures)* antara Indonesia dengan negara lawan atau calon lawan.

Pertahanan nirmiliter untuk mendukung lapis diplomasi dilakukan dengan memberdayakan K/L di luar bidang pertahanan untuk melakukan diplomasi sesuai tugas dan fungsinya secara terus menerus untuk mendapatkan kesepakatan damai.

LAPIS PERTAHANAN MILITER

Pengerahan kekuatan militer dilakukan apabila langkah diplomasi menemui kegagalan dan usaha-usaha nirmiliter lainnya tidak berhasil. Perlawanan militer dilaksanakan dengan mendahului tindakan lawan yang nyata-nyata akan menyerang Indonesia di luar wilayah negara/sejauh mungkin di luar wilayah Indonesia sebelum masuk wilayah ZEE (mandala luar).

Pertahanan militer menghadapi agresi musuh yang telah masuk ZEE dilaksanakan dalam susunan pertahanan yang mendalam dengan mengerahkan kekuatan militer untuk mencegah dan menghancurkan kekuatan militer musuh dalam wilayah ZEE sampai dengan batas terluar laut teritorial Indonesia (mandala utama).

Pertahanan militer untuk menghadapi agresi musuh yang telah memasuki laut teritorial sampai dengan wilayah daratan (mandala dalam) dilaksanakan dengan perang berlarut dengan menerapkan pola Tri Matra Terpadu.

Pertahanan militer dipersiapkan untuk menghadapi kecenderungan konflik kontemporer yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Untuk menghadapi perang modern yang berbasis teknologi, lapis pertahanan militer didukung dengan kemampuan dan kekuatan militer yang disesuaikan dengan hakikat ancaman berbasis teknologi. Kemampuan yang dipersiapkan antara lain untuk melakukan identifikasi secara dini hakikat ancaman, menghadapi perang pernika, perang siber, perang informasi, perang bawah laut dan permukaan, perang berbasis jaringan *(network centric warfare*), pertempuran menghadapi pesawat tanpa awak dan *urban warfare*; serta mampu menyelenggarakan pertahanan udara yang efektif.

Pertahanan nirmiliter dalam lapis pertahanan militer untuk menghadapi agresi, dilakukan dengan memberdayakan K/L di luar bidang pertahanan sesuai tugas dan fungsinya. K/L menyiapkan elemen elemen Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang siap dimobilisasikan untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama.

LAPIS PERTAHANAN UNTUK PERANG BERLARUT

Penyelenggaraan perang berlarut merupakan lapis terakhir dari sistem pertahanan Indonesia. Strategi pertahanan berlapis dalam kerangka perang berlarut dilakukan dalam bentuk perang semesta yang melibatkan seluruh bangsa Indonesia dan sumber daya nasional lainnya untuk mempertahankan tetap tegaknya NKRI. Perang berlarut dilaksanakan ketika perlawanan konvensional yang mengintegrasikan upaya pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter tidak memberikan hasil. Untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, perang berlarut menjadi pilihan dan diselenggarakan secara total di seluruh wilayah Indonesia.

SUMBER : GOOGLE

Strategi Perang Berlarut dilakukan melalui front bersenjata dan front politik. Front bersenjata menggunakan taktik perang gerilya untuk menguras kemampuan lawan dan pada saat yang tepat melancarkan serangan balas yang menentukan untuk mengusir lawan keluar dari wilayah NKRI. Front politik menggunakan kekuatan politik terutama diplomasi, dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai tujuan perang berlarut.

Pertahanan militer disiapkan untuk menyelenggarakan perang berlarut melalui taktik perang gerilya yang didukung oleh kemajuan teknologi modern dan dengan melibatkan seluruh elemen kekuatan nasional.

Pertahanan nirmiliter disiapkan untuk mendukung penyiapan penyelenggaraan perang berlarut dengan membangun melalui infrastruktur berbasis pertahanan, SDM, dan logistik wilayah sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing K/L di luar bidang pertahanan.

3.4.3.2.2 MENGHADAPI ANCAMAN MILITER BUKAN AGRESI

Ancaman militer bukan agresi dihadapi dalam kerangka menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Pengerahan kekuatan nasional disesuaikan dengan besarnya ancaman dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Besarnya kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan bentuk dan besarnya derajat ancaman yang dihadapi.

MENANGANI PELANGGARAN WILAYAH

Pertahanan militer untuk menangani ancaman pelanggaran wilayah negara di darat, laut maupun udara nasional dihadapi dengan mengerahkan Komponen Utama pertahanan negara. Perwujudan pengerahan kekuatan pertahanan dilaksanakan melalui langkah-langkah militer sesuai dengan tataran kewenangan. Penanganan pelanggaran wilayah negara dilakukan melalui pola Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP dilakukan untuk mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi konflik antarnegara. Jika terjadi peningkatan eskalasi dan adanya perubahan putusan OMSP menjadi OMP, perubahan tersebut harus didasari oleh kebijakan dan keputusan politik negara.

Pertahanan nirmiliter untuk menangani ancaman pelanggaran wilayah, dilaksanakan melalui diplomasi sebagai lini depan pertahanan negara untuk memberikan efek penangkalan. Upaya diplomasi juga diselenggarakan untuk mencari solusi secara bermartabat atas tindakan pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh unsur militer/nonkomersial suatu negara. Penyelesaian terhadap permasalahan sengketa perbatasan negara di darat, laut, dan udara nasional mengedepankan penyelesaian dengan prinsip saling menguntungkan.

MENGATASI GERAKAN SEPARATISME

Ancaman separatisme merupakan urusan dalam negeri Indonesia yang dihadapi dengan lapis pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang disesuaikan dengan tingkat penyebaran ancaman dan kekuatan separatisme.

SUMBER : GOOGLE

Pertahanan militer untuk menumpas gerakan separatisme bersenjata dilaksanakan dalam bentuk OMSP dengan menggunakan strategi yang tepat dan efektif. Pengerahan dan penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi separatisme dilandasi oleh kebijakan dan keputusan politik negara. Penyelenggaraan operasi militer diperkuat oleh lapis pertahanan nirmiliter sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan.

Pertahanan nirmiliter dalam menangani ide separatis dilaksanakan oleh K/L di luar bidang pertahanan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing dengan cara : *Pertama* meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan informasi yang kridibel dan komperhensif. *Kedua* mampu memberikan kontra informasi, yang lebih *intens* dalam hal keberhasilan pembangunan pada daerah yang menjadi medan separatis. *Ketiga* mampu melakukan kontra strategi nirmiliter dengan melakukan pendekatan kultural.

MENGATASI PEMBERONTAKAN BERSENJATA

Pertahanan militer untuk mengatasi pemberontakan bersenjata dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan putusan politik negara. Besar kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan besar dan kompleksitasnya ancaman yang dihadapi. Penggunaan kekuatan militer untuk menumpas pemberontakan bersenjata dilakukan sebagai perwujudan tugas operasi militer selain perang (OMSP). Dalam mengatasi pemberontakan bersenjata dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah demokrasi, hukum yang berlaku dan memegang prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

SUMBER : GOOGLE

Pertahanan nirmiliter untuk mengatasi pemberontakan bersenjata dengan melakukan pembangunan nasional didaerah secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka mendukung pertahanan militer.

MENANGANI SABOTASE

Pertahanan militer dalam menangani ancaman sabotase dilakukan sebagai langkah tindakan pencegahan dalam kerangka keselamatan bangsa. Penanganan ancaman sabotase juga diarahkan untuk melindungi kepentingan pertahanan, antara lain menjamin keamanan personel, Alutsista, pangkalan, dan instalasi pertahanan.

Penanganan terhadap ancaman sabotase dalam pola OMSP dilaksanakan dengan strategi dan pola operasi khusus. Sedangkan kekuatan yang dikerahkan disesuaikan dengan tingkatan risiko serta misi yang diemban. Dalam rangka penanganan terhadap ancaman sabotase, dikembangkan kemampuan militer yang diperlengkapi dengan alat peralatan teknologi untuk mendeteksi dan melumpuhkan usaha sabotase yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan.

Pertahanan nirmiliter dalam mengatasi ancaman sabotase dilaksanakan oleh K/L di luar bidang pertahanan sesuai tugas pokok dan fungsinya guna menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kewaspadaan dini dan tanggap terhadap situasi yang berkembang di lingkungannya. Model yang dilakukan dan dikembangkan, antara lain sistem peringatan dini serta sistem keamanan lingkungan di seluruh wilayah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

MENANGANI AKSI SPIONASE

Pertahanan militer untuk menangani aksi spionase dilaksanakan oleh satuan intelijen yang didukung dengan penggunaan teknologi intelijen modern. Disamping itu juga mengerahkan perangkat komando kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini dan cegah dini terhadap aksi spionase. Peran pertahanan militer dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penanganan aksi spionase secara rutin maupun operasi khusus untuk membongkar, melumpuhkan, dan membersihkan jaringan spionase.

SUMBER : GOOGLE

Pertahanan nirmiliter dalam penanganan aksi spionase melaksanakan langkah-langkah, baik secara mandiri maupun bersama-sama, dengan lapis pertahanan militer. Pencegahan dilakukan oleh K/L sesuai peran dan tugas pokok fungsinya dengan cara : *Pertama* meningkatkan kewaspadaan dini, serta kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya spionase. *Kedua* meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan agar masyarakat terhindar dari pengaruh kegiatan spionase. *Ketiga* menyusun sistem penanggulangan dan sistem pengamanan kegiatan, dokumen, berita, dan personel. *Keempat* menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi antispionase. *Kelima* menyusun perangkat peraturan dan perundang-undangan tentang pencegahan, penanggulangan dan penindakan aksi spionase.

SUMBER : GOOGLE

MENANGANI ANCAMAN TERORISME

Pertahanan militer untuk menangani ancaman terorisme bukan tindak kejahatan dilakukan oleh TNI sebagai komponen utama. Penanganan ancaman terorisme dilaksanakan dengan pola OMSP melalui pendekatan preventif, koersif, represif, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi yang dihadapi serta berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Penanganan melalui tindakan preventif dilakukan dengan mengintensifkan peran dan fungsi intelijen, komando kewilayahan, serta unsur-unsur militer lainnya. Fungsi intelijen di setiap kesatuan dan strata, baik dalam wujud intelijen manusia maupun intelijen berbasis teknologi, diberdayakan untuk mengungkap jaringan dan aktivitas teroris.

Komando Kewilayahan diberdayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi ancaman terorisme di daerah. Unsur-unsur kewilayahan didayagunakan untuk melakukan tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap kemungkinan ancaman terorisme.

Penanganan aksi terorisme internasional atau yang berkolaborasi dengan terorisme dalam negeri dilaksanakan secara lintas negara, lintas instansi secara terpadu, serta bekerja sama dengan negara lain berdasarkan kebijakan pemerintah dan politik luar negeri.

Pertahanan nirmiliter untuk mengatasi ancaman terorisme bukan tindak kejahatan, dilakukan oleh K/L di luar bidang pertahanan sebagai Komponen Pendukung sesuai dengan tugas dan fungsi secara bersinergi, terkoordinasi, dan terintegrasi.

MENANGANI ANCAMAN KEAMANAN LAUT

Penanganan keamanan laut dilaksanakan oleh kekuatan militer dan nirmiliter secara terpadu untuk mengatasi ancaman navigasi dan pelayaran, kejahatan lintas negara di laut (seperti perompakan, penyelundupan, dan pembajakan), penangkapan ikan ilegal, serta peredaran obat terlarang melalui laut untuk keselamatan pelayaran, perlindungan sumber daya alam, kelancaran mobilitas di laut, dan kepentingan pertahanan negara.

SUMBER : GOOGLE

Pertahanan militer untuk menangani ancaman keamanan laut dilaksanakan oleh militer sebagai bagian dari peran Polisionil *(Constabulary)*. Strategi penggelaran kekuatan dilakukan pada gelar permanen *(deployment)* dan gelar penindakan (*employment*) dengan memperhatikan pengembangan fasilitas pendukung pangkalan yang memadai.

Pertahanan nirmiliter untuk menangani ancaman keamanan Laut dilakukan sesuai dengan peran dan fungsi pemangku kepentingan dibidang kemaritiman. Pengamanan laut dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sebagai lini terdepan bersama-sama dengan lapis pertahanan militer untuk mewujudkan wilayah laut Indonesia yang aman dan stabil.

MENANGANI ANCAMAN KEAMANAN DIRGANTARA

Pengamanan dirgantara dilakukan oleh lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter melalui penegakan hukum di udara dengan melakukan pengamatan, identifikasi, dan penindakan dalam rangka menjaga dan menegakkan kedaulatan negara di udara.

SUMBER : GOOGLE

Pertahanan militer untuk menangani ancaman keamanan dirgantara dilakukan untuk mengidentifikasi setiap gerakan pelanggaran wilayah oleh pesawat asing. Pertahanan militer dibangun untuk meningkatkan kemampuan radar dan operasi udara guna mendeteksi secara akurat berkaitan dengan titik aktifitas penerbangan gelap.

Pertahanan nirmiliter untuk menangani ancaman keamanan dirgantara diselenggarakan dengan melakukan koordinasi lintas instansi dengan K/L serta swasta dalam pengelolaan ruang udara wilayah kedaulatan NKRI agar dapat menjamin keselamatan penerbangan. Pengelolaan keamanan dirgantara dilaksanakan melalui peningkatan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, sarana prasarana penerbangan, diplomasi dan regulasi tata ruang udara serta pengintegrasian pengawasan dan kontrol ruang udara.

MENANGANI KONFLIK KOMUNAL

Pertahanan nirmiliter untuk menangani konflik komunal dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan penegakkan hukum. Pendekatan dalam penanganan konflik komunal dilakukan dengan persuasif yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Pencegahan konflik komunal oleh K/L dilaksanakan melalui peningkatan kehidupan sosial/masyarakat di berbagai aspek untuk menghindarkan mereka dari kesenjangan sosial, yang dapat menyulut konflik antar masyarakat.

SUMBER : GOOGLE

Pertahanan militer untuk menangani konflik komunal diselenggarakan dalam kerangka pertahanan negara untuk menjamin keselamatan bangsa. Konflik komunal yang berimplikasi terhadap penggunaan kekuatan militer diletakkan pada kerangka tugas militer untuk membantu Kementerian/ Lembaga sebagai Unsur Utama. Pelibatan kekuatan militer untuk penanganan konflik komunal berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara yang dilaksanakan dengan pola OMSP.

SUMBER : GOOGLE

PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN PRESIDEN, DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, BESERTA KELUARGANYA, SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

Pertahanan militer untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden, beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan dilakukan oleh lapis pertahanan militer melalui OMSP untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan.

Tugas pengamanan dilakukan oleh lapis pertahanan militer yang dipersiapkan dan disiagakan setiap saat. Penyelenggaraan pengamanan dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Penyelenggaraan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden ketika berada di luar negeri diselenggarakan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dari negara setempat dengan memanfaatkan jalur kerja sama bilateral, termasuk kerja sama militer.

Penyelenggaraan pengamanan di wilayah NKRI diatur secara khusus dan dikoordinasikan dengan unsur-unsur keamanan setempat.

Pertahanan nirmiliter untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden, beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan bersifat tidak langsung, kecuali yang dilakukan oleh unsur Kepolisian Negara. Peran lapis pertahanan nirmiliter adalah dalam lingkup informasi intelijen atau yang terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat upaya pengamanan yang dilakukan oleh lapis pertahanan militer.

PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL YANG BERSIFAT STRATEGIS

Pengamanan objek vital strategis nasional dilakukan oleh Komponen Utama pertahanan negara yang meliputi pengamanan terhadap Istana Negara, Istana Wakil Presiden, bangunan-bangunan lain yang merupakan simbol negara, bangunan atau sarana dan prasarana yang mempunyai nilai sejarah atau menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia atau masyarakat internasional.

Pengamanan oleh lapis pertahanan militer terhadap objek vital strategis nasional ditujukan untuk pengamanan terhadap ancaman dan gangguan keamanan yang berdimensi ancaman militer. Penggelaran pengamanan oleh lapis pertahanan militer dilaksanakan dalam jangka panjang dan didukung dengan gelar alutsista yang bernilai strategis. Pada masa damai, pengamanan objek vital dilaksanakan dengan penggelaran OMSP nontempur melalui langkah-langkah operasional yang disesuaikan dengan kondisi dan besaran tugas perlindungan yang dibebankan.

SUMBER : GOOGLE

Pertahanan nirmiliter untuk pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis dilaksanakan secara internal yang melekat pada manajemen objek vital tersebut. Pengamanan dilakukan dengan pelibatan unsur-unsur satuan keamanan internal, termasuk yang dilakukan oleh Kepolisian yang merupakan bagian dari peran lapis pertahanan nirmiliter. Penyelenggaran pengamanan dilakukan secara sinergis yang memadukan kekuatan militer dan kemampuan nirmiliter untuk menghasilkan *output* yang optimal.

3.4.3.2.3 TUGAS BANTUAN TNI

Tugas bantuan TNI kepada K/L di luar bidang pertahanan dilaksanakan oleh militer sebagai unsur lain kekuatan bangsa dengan memberdayakan segenap kekuatan pertahanan militer yang dimiliki. Bentuk tugas bantuan TNI antara lain: memberikan bantuan pemberdayaan wilayah pertahanan negara, tugas bantuan TNI kepada Pemda, bantuan TNI kepada Kepolisian Negara, tugas TNI dalam pengamanan tamu negara, dan tugas TNI dalam pencarian dan pertolongan SAR. Pelibatan TNI dalam tugas bantuan didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara.

TUGAS TNI DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN

Tugas TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemberdayaan wilayah pertahanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pemberdayaan wilayah pertahanan untuk mendukung kepentingan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan. Fungsi pengelolaan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Tugas bantuan dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan diselenggarakan TNI melalui OMSP atas kebijakan dan keputusan politik negara. Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan melalui peran TNI dalam membantu pemerintah di bidang penataan ruang, kegiatan survei, pemetaan, dan penyiapan daerah sebagai ruang, alat dan kondisi juang. TNI bekerja sama dengan K/L di luar bidang pertahanan mendorong pembangunan nasional yang diintegrasikan dengan penyiapan logistik wilayah untuk kepentingan pertahanan. Pemberdayaan wilayah pertahanan juga mencakup pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan pulau-pulau kecil terluar.

Keberadaan TNI di sepanjang wilayah perbatasan dilakukan untuk memberikan efek pembangunan nasional, yakni mendorong pertumbuhan baik di bidang keamanan, ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Langkah pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan pulau-pulau kecil terluar tersebut dikembangkan melalui kerja sama terpadu dengan K/L.

SUMBER : GOOGLE

SUMBER : GOOGLE

TUGAS BANTUAN TNI KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH

Bantuan TNI kepada pemerintah daerah (Pemda) baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota pada dasarnya merupakan bantuan TNI dalam kerangka keselamatan umum yang pelaksanaannya melalui OMSP.

Penyelenggaraannya berdasarkan permintaan bantuan militer oleh Pemda setempat untuk menangani suatu tindakan darurat, termasuk pelaksanaan program Bhakti TNI. Dalam kondisi ketika Pemda menghadapi suatu kesulitan atau kondisi darurat yang memerlukan bantuan TNI, Pemda dapat mengajukan bantuan TNI tersebut kepada Panglima atau Komandan Militer setempat. Atas dasar permintaan tersebut, Panglima TNI atau Komandan Militer setempat menunjuk satuan TNI yang akan ditugaskan menurut kebutuhan.

Jenis-jenis bantuan TNI yang dapat dimintakan oleh Pemda dan diberikan oleh TNI disesuaikan dengan kemampuan TNI dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permintaan Pemda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Komando Militer setempat atas dasar pertimbangan tugas TNI yang lebih mendesak atau karena pertimbangan tugas yang lebih strategis, secara hierarki Komandan Militer setempat menyampaikan kepada Panglima TNI tentang hal tersebut guna penyelesaian lebih lanjut.

SUMBER : GOOGLE

TUGAS BANTUAN TNI KEPADA KEPOLISIAN NEGARA

Bantuan TNI kepada Kepolisian pada hakikatnya merupakan bantuan TNI dalam kerangka penegakkan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan melalui OMSP. Penyelenggaraannya berdasarkan permintaan pihak Kepolisian kepada TNI yang disampaikan secara hierarkis kepada Panglima TNI. Lingkup tugas dalam permintaan bantuan TNI disesuaikan dengan kemampuan dan/atau kemahiran prajurit TNI serta dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah operasional dikembangkan oleh TNI berdasarkan jenis dan besarnya ancaman.

Dalam hal permintaan bantuan TNI oleh Kepolisian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh komando militer setempat atas dasar pertimbangan tugas TNI yang lebih mendesak atau karena pertimbangan tugas yang lebih strategis, secara hierarkis Komando Militer setempat menyampaikan kepada Panglima TNI tentang hal tersebut guna penyelesaian lebih lanjut.

TUGAS PENGAMANAN TAMU NEGARA

Tugas TNI mencakup pula pengamanan tamu negara, yakni pengamanan terhadap tamu negara setingkat kepala negara serta perwakilan negara asing yang berada di Indonesia. Dalam hal Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan Negara lain tersebut menyertakan unsur pengamanan dari negaranya sendiri, pelaksanaannya diselenggarakan oleh TNI atau dalam kondisi khusus melalui jalur kerja sama bilateral, yakni kerja sama antarmiliter kedua negara. Langkah-langkah operasional dikembangkan oleh TNI disesuaikan dengan kondisi dan besaran tugas pengamanan.

SUMBER : GOOGLE

TUGAS BANTUAN TNI DALAM PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)

Bantuan TNI dalam pencarian dan pertolongan *Search And Rescue* (SAR) diselenggarakan TNI dengan mengerahkan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelamatkan korban dengan cara bekerja sama dengan unsur pertahanan nirmiliter. Pemberian bantuan SAR merupakan bagian dari OMSP, yang pelaksanaannya dikoordinasikan TNI dengan pihak yang membutuhkan bantuan.

SUMBER : GOOGLE

Langkah-langkah operasional dikembangkan oleh TNI berdasarkan jenis dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan SAR, TNI dapat bekerja sama secara sinergi antarlembaga atau dengan memanfaatkan wadah atau lembaga koordinasi yang ada.

3.4.3.3 MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER

Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Ancaman nonmiliter tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa, namun pada skala tertentu dapat bereskalasi atau berkembang luas sehingga mengganggu stabilitas nasional, yang pada akhirnya mengancam eksistensi negara. Ancaman nonmiliter ditangani dengan pendekatan nirmiliter, sedangkan fungsi pertahanan militer dalam kondisi tertentu sebagai unsur bantuan yang pelibatannya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

MENGHADAPI ANCAMAN BERDIMENSI IDEOLOGI

Pertahanan negara untuk menghadapi ancaman berdimensi idiologi dilakukan dengan mensinergikan pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer.

Pertahanan nirmiliter menempatkan K/L di luar bidang pertahanan untuk menghadapi ancaman berdimensi idiologi dilakukan dengan mendinamisasikan kekuatan idiologi. Dalam kerangka bela negara kekuatan idiologi diwujudkan untuk mencegah meluasnya pengaruh idiologi lain yang bertentangan dengan idiologi Pancasila.

SUMBER : GOOGLE

Pertahanan militer sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam membantu Unsur Utama untuk menghadapi ancaman berdimensi idiologi didasari atas kebijakan dan keputusan politik negara. Bentuk tugas bantuan militer kepada Unsur Utama disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas pertahanan militer. Bentuk bantuan dapat dilakukan dengan kegiatan seperti operasi bhakti, pemahaman dan pengamalan Pancasila di lingkungan pendidikan, pekerjaan dan pemukiman.

MENGHADAPI ANCAMAN BERDIMENSI POLITIK

Pertahanan negara untuk menghadapi ancaman berdimensi politik dilakukan dengan mensinergikan pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer.

Pertahanan nirmiliter menempatkan K/L di luar bidang pertahanan untuk menghadapi ancaman berdimensi politik dilakukan dengan mendinamisasikan kekuatan politik dalam negeri dan politik luar negeri.

Pendekatan politik dalam negeri dilakukan dengan membangun dan menata sistem politik dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebhinekaan. Penataan diwujudkan melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas dalam penguatan tiga pilar.

SUMBER : GOOGLE

Pertama, menyelenggarakan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, dan bertanggung jawab. *Kedua*, melaksanakan penguatan lembaga Legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan professional, mampu bersinergi dengan pemerintah, mampu melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi. *Ketiga,* melaksanakan optimalisasi kekuatan politik nasional, baik partai politik maupun organisasi massa sebagai instrumen dalam pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan politik luar negeri dilaksanakan dengan mendinamisasikan strategi dan upaya diplomasi melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik politik negara. Pendekatan tersebut dimulai dari tataran regional, dan global. Pada lingkup regional, politik luar negeri Indonesia diwujudkan untuk membangun hubungan dan kerja sama dengan negara lain sehingga tercipta kondisi saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Khusus untuk lingkup kawasan Asia Tenggara, politik luar negeri Indonesia dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan dalam merangkul dan memelopori negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang terdiri dari Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Budaya ASEAN.

Di samping itu, politik luar negeri Indonesia juga diwujudkan untuk penguatan ASEAN Plus yang terdiri atas negara anggota ASEAN bersama-sama dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru, Rusia, Amerika Serikat, dalam kerangka menjamin kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Pada lingkup global, politik luar negeri Indonesia dilaksanakan secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui organisasi PBB, Gerakan Nonblok, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Forum Regional ASEAN (ARF). Langkah-langkah diplomasi dilakukan guna mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik.

Pertahanan militer sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam membantu Unsur Utama untuk menghadapi ancaman berdimensi politik didasari atas kebijakan dan keputusan politik negara. Bentuk tugas bantuan pertahanan militer kepada Unsur Utama disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas pertahanan militer. Bantuan dilakukan dalam bentuk diplomasi pertahanan untuk mendukung usaha-usaha diplomasi nirmiliter yang meliputi peningkatan kesiapsiagaan dan operasional kekuatan militer, kemandirian industri pertahanan, latihan dan kerja sama militer serta pamer kekuatan *(show of force)* dan kemampuan militer *(military capability).*

MENGHADAPI ANCAMAN BERDIMENSI EKONOMI

Pertahanan negara untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dilakukan dengan menyinergikan pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer.

Pertahanan nirmiliter menempatkan K/L yang membidangi masalah ekonomi untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi yang dilakukan dengan mendinamisasikan kekuatan ekonomi. Tugas dan fungsi kementerian terkait mengakselerasi pembangunan perekonomian nasional yang berdaya saing tinggi melalui pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengatasi pengangguran tanpa menimbulkan efek bagi peningkatan inflasi, penetapan sistem ekonomi yang berdasarkan sistem ekonomi Pancasila. Peningkatan pendapatan per kapita sampai pada kisaran US$ 4,000, serta mengatasi ketimpangan pada distribusi pendapatan.

Ancaman berdimensi ekonomi diatasi dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan berbasis nasionalisme *(nationally),* bangga akan penggunaan produk dalam negeri *(domestically).* Pembangunan ekonomi diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi dan diikuti dengan distribusi pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang memenuhi equitas *(growth with equity),* berkeadilan *(justice)* dan berkelanjutan *(sustainable*). Pembangunan ekonomi diarahkan agar tidak merusak lingkungan, tidak menguras sumber kehidupan dan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kecukupan *(need not greed).*

Sistem perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas dibangun dan ditata secara terintegrasi, bersifat multisektoral serta mencakupi ekonomi makro dan mikro. Dari sisi ekonomi makro, penataan sistem perbankan, fiskal, dan moneter merupakan agenda yang menjadi prioritas. Bersamaan dengan itu, pembangunan ekonomi mikro terus digalakkan untuk memberikan jaminan kepastian tentang ketersediaan kebutuhan pokok kehidupan, terutama kepada sekitar 70% rakyat Indonesia yang memiliki ketergantungan pada sektor riil. Bidang fiskal dan moneter dijaga agar nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tetap stabil serta sektor ekonomi mikro dijaga agar mampu bertahan.

Pembangunan dan penataan sistem ekonomi nasional diintensifkan secara bertahap dan berlanjut untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketertinggalan melalui penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Salah satu sektor dalam penciptaan lapangan kerja adalah peningkatan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah yang disebar di seluruh daerah melalui pengembangan pola kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta.

Pengelolaan sumber daya alam diselenggarakan melalui pencegahan eksploitasi yang berlebihan dan mengembangkan sedini mungkin usaha-usaha pelestarian dan konservasi sehingga keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Eksploitasi pengelolaan sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui, dibatasi melalui suatu pengendalian yang ketat. Eksploitasi yang melibatkan pihak asing melalui kontrak yang berjangka panjang dan terus-menerus, perlu dikurangi dan diisi dengan peningkatan pelibatan pengusaha dalam negeri.

Pembangunan sektor ekonomi diarahkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Upaya pembangunan sektor ekonomi melalui pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. Status daerah tertinggal mencapai lebih dari sepertiga jumlah kabupaten/Kota di Indonesia, diantaranya kabupaten yang tersebar di tiga wilayah perbatasan yakni di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi ke depan dilaksanakan secara bertahap dengan membangun di sejumlah kota untuk menopang terselenggaranya kesinambungan pembangunan di wilayah terpencil.

Pertahanan militer sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam membantu Unsur Utama untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi didasari atas kebijakan dan keputusan politik negara. Bentuk tugas bantuan militer kepada Unsur Utama disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas pertahanan militer. Keterlibatan lapis pertahanan militer diwujudkan dengan meningkatkan penyelenggaran pertahanan negara guna menjamin dan menjaga stabilitas keamanan nasional yang dinamis. Bentuk bantuan dilakukan dalam rangka membantu kelancaran distribusi komoditas, dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. Pemanfaatan program kegiatan dan Operasi Bhakti dilakukan melalui kerja sama dengan unsur pertahanan nirmiliter untuk mendinamisasi masyarakat dalam mengatasi ancaman ekonomi.

MENGHADAPI ANCAMAN BERDIMENSI SOSIAL BUDAYA

Pertahanan negara untuk menghadapi ancaman berdimensi sosial budaya dilakukan dengan menyinergikan pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer.

Pertahanan nirmiliter menempatkan K/L di bidang sosial budaya untuk menghadapi ancaman berdimensi sosial budaya dilakukan dengan mendinamisasikan kekuatan sosial budaya dalam negeri dan sosial budaya luar negeri.

Pendekatan dalam negeri difokuskan pada pemecahan isu kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakadilan. Langkah-langkah strategis ditempuh melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, penegakan hukum, dan keteladanan pemimpin yang diselaraskan dengan pembangunan di bidang ekonomi.

Pendidikan diarahkan tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan hal fundamental yang terkait dengan kewajiban dan hak bela negara, yakni rasa cinta tanah air untuk mempertahankan NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam ke-bhinnekaan, meyakini Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionil, rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Pendidikan dilakukan dan dikelola secara profesional dengan orientasi membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menghadapi tantangan di era globalisasi, serta bermoral dan beretika.

Pelayanan sektor kesehatan diarahkan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara proporsional guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan ditingkatkan agar mencapai standar internasional sehingga menjadi komoditas yang mampu bersaing dengan pihak asing di era globalisasi.

Penegakan hukum diarahkan untuk mengatasi ancaman berdimensi sosial, terkait dengan konflik sosial. Penegakan hukum juga ditekankan pada penanganan penyebaran narkoba dan penyebaran virus HIV/AIDS dan penanganan kasus-kasus kejahatan dengan seadil-adilnya.

Keteladanan pemimpin ditegakkan mulai dari tingkat nasional (eksekutif, legislatif, dan kekuasaan peradilan), di tingkat partai politik serta organisasi kemasyarakatan, ilmuwan, dan agama.

Unsur Utama yang membidangi sosial budaya melakukan upaya konkret untuk mampu menyaring nilai-nilai negatif budaya asing serta mengontrol penyebarluasannya. Unsur Utama pertahanan nirmiliter yang membidangi tata nilai sosial budaya mengembangkan pilihan strategi untuk mencegah dekadensi moral, melemahnya kepercayaan kepada kemampuan sendiri, mudah dipengaruhi, serta kehilangan idealisme dan jati diri bangsa. Perkuatan karakter dan identitas bangsa Indonesia didinamisasi dengan melakukan pengelolaan keberagaman masyarakat Indonesia dalam suku bangsa, bahasa, dan budaya sehingga menjadi kekuatan pemersatu bangsa dalam menggerakkan roda pembangunan nasional, sekaligus kekuatan yang mencegah nilai-nilai luar yang merugikan.

Fungsi pertahanan nirmiliter yang membidangi informasi mendorong insan pers dalam memberdayakan media cetak dan elektronik sebagai sarana pencerahan kepada masyarakat dengan lebih mengutamakan kepentingan nasional.

Pertahanan militer sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam membantu Unsur Utama untuk menghadapi ancaman berdimensi sosial budaya didasari atas kebijakan dan keputusan politik negara. Bentuk tugas bantuan militer kepada Unsur Utama disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas pertahanan militer. Bentuk bantuan dapat berupa pengembangan rasa nasionalisme dan memupuk tata kehidupan yang harmonis serta mewujudkan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Keberadaan unsur pertahanan militer yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia diberdayakan untuk membantu Unsur Utama Pertahanan Nirmiliter dalam mengakselerasi upaya mengatasi penyebarluasan nilai-nilai yang negatif dan merugikan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

MENGHADAPI ANCAMAN BERDIMENSI KESELAMATAN UMUM

Pertahanan negara untuk menghadapi ancaman berdimensi keselamatan umum dilakukan dengan menyinergikan pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer.

Pertahanan nirmiliter menempatkan K/L yang membidangi masalah keselamatan umum untuk menghadapi ancaman berdimensi keselamatan umum dilakukan dengan mendinamisasikan kekuatan nasional penyelenggara keselamatan umum.

Fungsi keselamatan umum bersifat multi-instansi yang mencakup, antara lain, penanganan terhadap penanggulangan dampak bencana alam dan bencana buatan manusia, penyakit pandemik, keselamatan transportasi, serta pengungsian.

Strategi yang digunakan meliputi peringatan dini, mitigasi, dan penanganan mulai tanggap darurat sampai dengan rehabilitasi. Manajemen penanganan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan umum mengintegrasikan fungsi-fungsi K/L di luar bidang pertahanan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam satu kesatuan pengendalian.

Dalam hal keselamatan umum menyangkut penanganan wabah penyakit pandemik, instrumen penanganannya dilakukan oleh unsur kesehatan atau pertanian sebagai Unsur Utama, bergantung kepada titik berat bahaya yang dihadapi, serta dibantu oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Dalam hal ancaman keselamatan umum menyangkut penanggulangan dampak bencana alam, Unsur Utama bertindak mendinamisasikan kekuatan nasional untuk penanganan pengungsian, pencarian korban, serta usaha-usaha konkret dalam mengatasi dampak bencana serta langkah-langkah rekonstruksi.

Pertahanan militer sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam membantu Unsur Utama untuk menghadapi ancaman berdimensi keselamatan umum dilaksanakan dengan mempertimbangkan kecepatan penanganan ancaman sambil menunggu kebijakan dan keputusan politik negara. Bentuk tugas bantuan militer kepada Unsur Utama disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas pertahanan militer. Pengerahan pertahanan militer untuk menghadapi ancaman berdimensi keselamatan umum dilakukan untuk penanganan dampak bencana alam baik berskala nasional maupun berskala daerah.

MENGHADAPI ANCAMAN BERDIMENSI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pertahanan negara untuk menghadapi ancaman berdimensi ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan mensinergikan pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer.

Pertahanan nirmiliter menempatkan K/L yang membidangi masalah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi yang dilakukan dengan mendinamisasikan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Unsur Utama mendinamisasi kekuatan dan kemampuan teknologi nasional untuk mengimbangi tekanan pihak luar yang menggunakan faktor teknologi yang dapat melemahkan daya tangkal bangsa. Dalam pengelolaan teknologi diperlukan upaya melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pertahanan nirmiliter.

Ancaman ilmu pengetahuan dan teknologi dihadapi dengan strategi pembangunan nasional di bidang teknologi diselenggarakan untuk mewujudkan kemandirian industri nasional yang berdaya saing untuk mengimbangi kemajuan serta mengatasi ketergantungan teknologi dari negara-negara lain.

SUMBER : GOOGLE

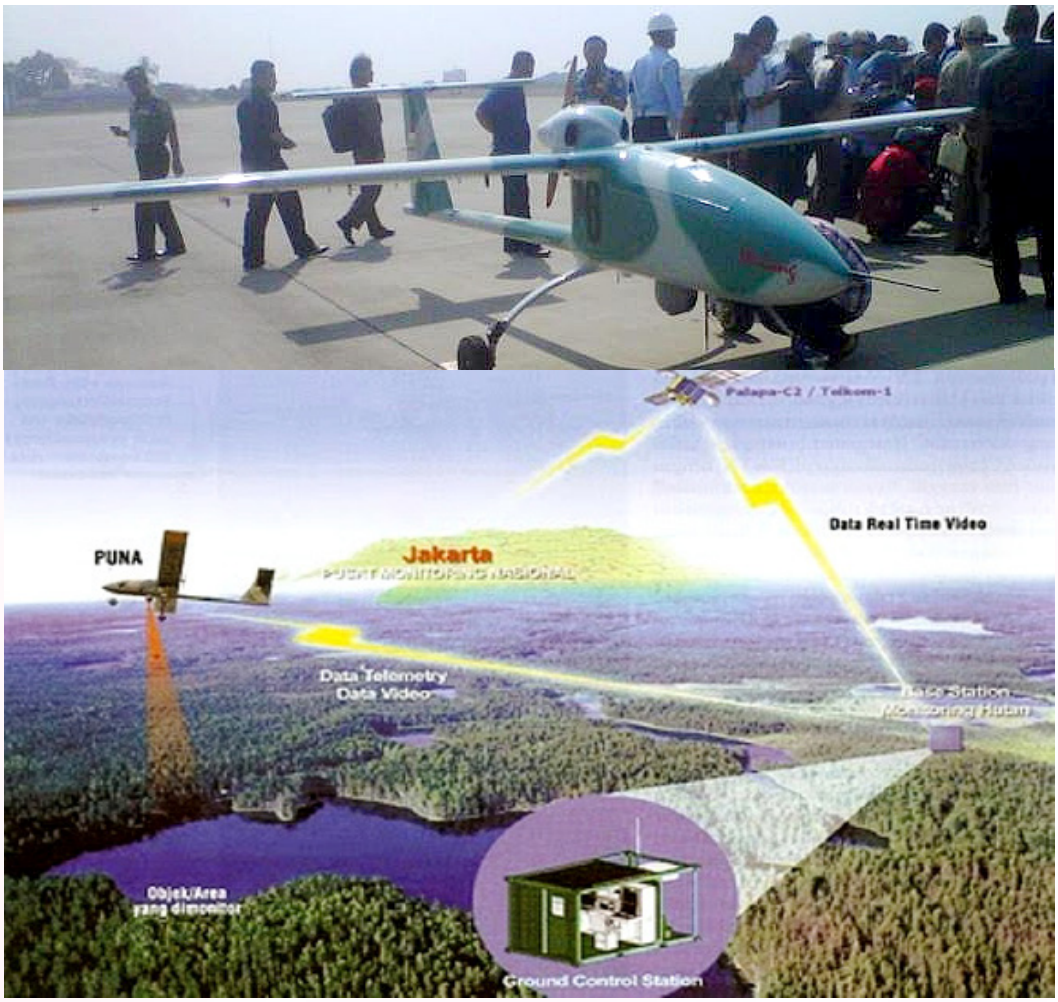

Khusus dalam menghadapi ancaman dunia maya *(cyber threat)*, upaya kemandirian dikembangkan dalam bentuk kemampuan pertahanan siber (*cyber defense*). Pertahanan siber bertujuan untuk melindungi jaringan sistem informasi dan komunikasi pertahanan negara.

Dalam bidang pertahanan, pembangunan teknologi pertahanan diarahkan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa, yakni kemampuan untuk memproduksi sendiri kebutuhan pertahanan seperti pengembangan nano-teknologi, peluru kendali, persenjataan dengan sistem roket yang dikendalikan oleh satelit, alat komunikasi pertahanan, pesawat tanpa awak, bahan peledak, propelan, serta bidang otomotif dengan memproduksi mesin-mesin kendaraan taktis hingga kendaraan tempur berat.

Pertahanan militer sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam membantu Unsur Utama untuk menghadapi ancaman berdimensi ilmu pengetahuan dan teknologi didasari atas kebijakan dan keputusan politik negara. Bentuk tugas bantuan militer kepada Unsur Utama disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas pertahanan militer. Pertahanan militer semaksimal mungkin memberdayakan bidang penelitian dan pengembangan teknologi serta rekayasa teknologi untuk mendeteksi dan mencegah ancaman, serta membantu mengakselerasi usaha kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Teknologi pertahanan dikembangkan dengan cara membangun komitmen untuk sebesar-besarnya memanfaatkan produk dalam negeri dalam pembangunan Postur Pertahanan Negara sebagai stimulus yang mendorong industri agar lebih bergairah mengembangkan usahanya.

MENGHADAPI ANCAMAN BERDIMENSI LEGISLASI

Dimensi ancaman legislasi dapat dengan mudah berkembang dan mempengaruhi dimensi-dimensi lainnya seperti dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, informasi, teknologi dan keamanan. Spektrum ancaman legislasi dapat berubah dari lokal ke nasional. Perkembangan eskalasi ancaman legislasi tidak mudah untuk diprediksi. Kompleksitas ancaman di bidang legislasi menuntut semua elemen bangsa untuk saling mendukung dan bersinergi mengatasinya. Satu sama lain senantiasa diharapkan mengindahkan tatanan dan lingkup kewenangan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3.4.4 MELAKSANAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN DAN PERDAMAIAN DUNIA

Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain. Sebagai bagian dari masyarakat internasional serta posisi Indonesia yang bertetangga dengan sejumlah negara, kepentingan nasional di bidang pertahanan negara tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga internasional. Kenyataan tersebut mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama dengan negara lain sebagai kepentingan pertahanan negara yang akan ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang.

LINGKUP DAN ESENSI KERJA SAMA PERTAHANAN

Esensi kerja sama pertahanan yang diselenggarakan Indonesia adalah untuk membangun saling percaya antarbangsa sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara lain. Kerja sama pertahanan juga bertujuan membangun kapabilitas pertahanan, melalui bidang pendidikan, latihan, peningkatan profesional prajurit TNI, pengadaan Alutsista strategis serta transfer teknologi bagi kemandirian sarana industri pertahanan Indonesia.

Dalam konteks tersebut, kerja sama pertahanan akan dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan rasa saling percaya di antara bangsa-bangsa di dunia melalui bidang pertahanan. Sejalan dengan itu, diplomasi pertahanan akan lebih diefektifkan melalui langkah-langkah yang lebih konkret, aktif dan bermartabat.

Pada tataran regional, kerja sama pertahanan diarahkan bagi terwujudnya kawasan regional yang damai dan stabil melalui upaya bersama antarnegara di kawasan, serta menjunjung tinggi hak kedaulatan negara masing-masing dan tidak saling mengintervensi urusan negara lain. Kerja sama pertahanan pada lingkup regional akan diutamakan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk mitra dialog dalam usaha untuk memelihara dan memperkuat stabilitas keamanan kawasan. Selain dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, kerja sama pertahanan juga dilakukan dengan negara-negara luar Kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Indonesia serta negara-negara besar dan yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan, termasuk mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

BENTUK KERJA SAMA PERTAHANAN

Kerja sama pertahanan sebagai sarana pengembangan diplomasi pertahanan guna membangun saling percaya. Kerja sama pertahanan dengan negara lain dikembangkan baik di kawasan maupun di luar kawasan, dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta tidak mengarah kepada pembentukan suatu pakta pertahanan.

Penyelenggaraan kerja sama pertahanan lebih dikembangkan dalam model kerja sama bilateral maupun multilateral untuk membangun saling percaya, mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama, termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara. Dalam konteks tersebut, kerja sama diwujudkan dalam bentuk dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis dan ke depan lebih dikembangkan guna menyentuh substansi pertahanan yang lebih komprehensif.

Kerja sama pertahanan pada lingkup regional di kawasan Asia Tenggara dan di luar kawasan termasuk yang berbatasan dengan Indonesia diselenggarakan untuk mengatasi isu-isu keamanan bersama, saling memberikan bantuan dalam kerangka resolusi konflik, dan mengatasi bencana alam yang berskala nasional atau bidang lain yang menjadi kepentingan bersama. Kerja sama pengamanan Selat Malaka akan dipertahankan dan menjadi model untuk menyusun kerja sama pertahanan kawasan dan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dalam penanganan isu-isu keamanan bersama disesuaikan dengan paradigma kepentingan dan perkembangan politik luar negeri Indonesia.

PERDAMAIAN DUNIA

Indonesia memiliki komitmen untuk memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan persamaan hak dan kedudukan, menghargai kedaulatan tiap negara, serta tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Komitmen tersebut didasarkan pada cara pandang bahwa Indonesia tidak mungkin dapat hidup tenteram dalam dunia yang kondisinya tidak stabil. Konflik di kawasan dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kondisi keamanan dalam negeri. Atas dasar itu, Indonesia akan senantiasa mengambil bagian untuk bekerja sama dengan negara-negara lain serta masyarakat internasional dalam usaha-usaha untuk mencegah dan mengatasi persoalan-persoalan di berbagai kawasan yang mengancam atau mengganggu stabilitas dan perdamaian dunia.

Keikutsertaan Indonesia melalui usaha-usaha perdamaian di berbagai kawasan semakin membangun kepercayaan dunia tentang peran penting dan kinerja Indonesia sebagai mitra strategis masyarakat internasional dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas global.

SUMBER : GOOGLE

Dalam mewujudkan perdamaian dunia, sektor pertahanan negara Indonesia telah mengambil peran aktif selama bertahun-tahun dan mengukir prestasi yang membanggakan. Peran aktif Indonesia di bidang pertahanan diwujudkan melalui keikutsertaan Indonesia dalam tugas-tugas perdamaian dunia yang diemban oleh TNI dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik melalui Kontingen Garuda maupun sebagai pengamat perdamaian di sejumlah negara. Keikutsertaan TNI sejak tahun 1957 dengan menggelar Kontingen Garuda I (KONGA I) di Mesir diikuti Kontingen-Kontingen Garuda berikutnya di berbagai negara menunjukkan komitmen yang tinggi dari bangsa Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi.

Prestasi Kontingen Garuda serta pengamat perdamaian yang ditunjukkan oleh prajurit-prajurit TNI sungguh membanggakan dan semakin membangun kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola pertahanan. Prestasi tersebut telah mengantarkan Indonesia memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Dalam rangka itu, pengalaman dan prestasi Indonesia akan menjadi kunci untuk membantu negara lain bagi terwujudnya kawasan yang stabil dan aman.

Perkembangan global yang semakin kompleks serta kondisi keamanan yang tidak menentu berimplikasi terhadap kebutuhan untuk mempersiapkan diri secara lebih baik dan lebih prima. Dalam rangka itu, agenda peningkatan kemampuan TNI dalam mengemban tugas-tugas perdamaian dunia dan tugas pertahanan di kawasan diarahkan untuk menjadikan kontingen perdamaian Garuda sebagai kontingen kelas dunia yang disegani dan dipercaya oleh komunitas internasional. Upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan prajurit TNI untuk mengemban tugas perdamaian dunia dilakukan oleh TNI melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI) yang memiliki fungsi dan peran strategis dan diberdayakan secara sungguh-sungguh dan berlanjut.

Guna menciptakan prakondisi untuk tampil menjadi kontingen kelas dunia yang diakui dan mendapat kepercayaan, maka TNI secara terus menerus memelihara pengetahuan dan keterampilan prajurit serta membangun kemampuan Alutsista dan peralatan yang modern dan diperlukan untuk menyelenggarakan tugas perdamaian dunia. Kebutuhan memperlengkapi diri dengan alat utama sistem senjata yang mendukung mobilitas serta memproteksi diri dari kemungkinan bahaya yang mengancam selama dalam tugas perdamaian dunia akan tetap menjadi prioritas untuk direalisasikan, di antaranya dengan membangun dan mengembangkan kesatuan-kesatuan pemelihara perdamaian mekanis yang sewaktu-waktu siap dikerahkan (*standby forces*).

3.4.5 MENGEMBANGKAN INDUSTRI PERTAHANAN UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA

Industri pertahanan negara merupakan salah satu faktor penting dalam usaha pemerintah membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Industri pertahanan dikembangkan melalui serangkaian kebijakan pemerintah dan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan agar memiliki kemandirian untuk mendukung tercapainya kemampuan pertahanan negara.

Percepatan kemandirian Industri Pertahanan Nasional, memerlukan kerja sama sinergis antara pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri. Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu diperlukan pengelolaan manajemen yang visioner melalui peningkatan kreatifitas, inovasi, mengandalkan SDM yang memiliki idialisme dan intelektualisme serta membangun daya saing yang tinggi sehingga mampu mengikuti perkembangan IPTEK.

Kebijakan industri pertahanan dilaksanakan melalui program pengembangan industri serta program penelitian dan pengembangan pertahanan yang mencakup beberapa hal. *Pertama*, penelitian pengembangan pertahanan termasuk konsep pertahanan dan keamanan. *Kedua*, pengembangan kerja sama industri perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan. *Ketiga*, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bidang desain rekayasa. *Keempat*, perbaikan pemeliharaan dan pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan.

Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan untuk pengumpulan informasi, pengintaian, dan pengawasan (*intelligence, reconnaissance and surveillance*), untuk menangkal upaya pihak asing melakukan spionase, pelanggaran wilayah perbatasan, dan upaya mengubah batas negara. Selain digunakan untuk menangkal ketiga hal tersebut, kemajuan teknologi digunakan juga untuk deteksi dini terhadap infiltrasi asing dan upaya memata-matai. Selanjutnya, kemampuan militer dibangun dengan memanfaatkan sistem pengintaian yang berbasis teknologi satelit, pesawat terbang tanpa awak (UAV), dan penggunaan radar untuk mengawasi wilayah udara, khususnya wilayah perbatasan. Pelibatan pertahanan nirmiliter dilakukan dengan menstranfer kapabilitas dari kepentingan sipil untuk kepentingan militer. Industri pertahanan didorong melakukan inovasi untuk kepentingan pertahanan.

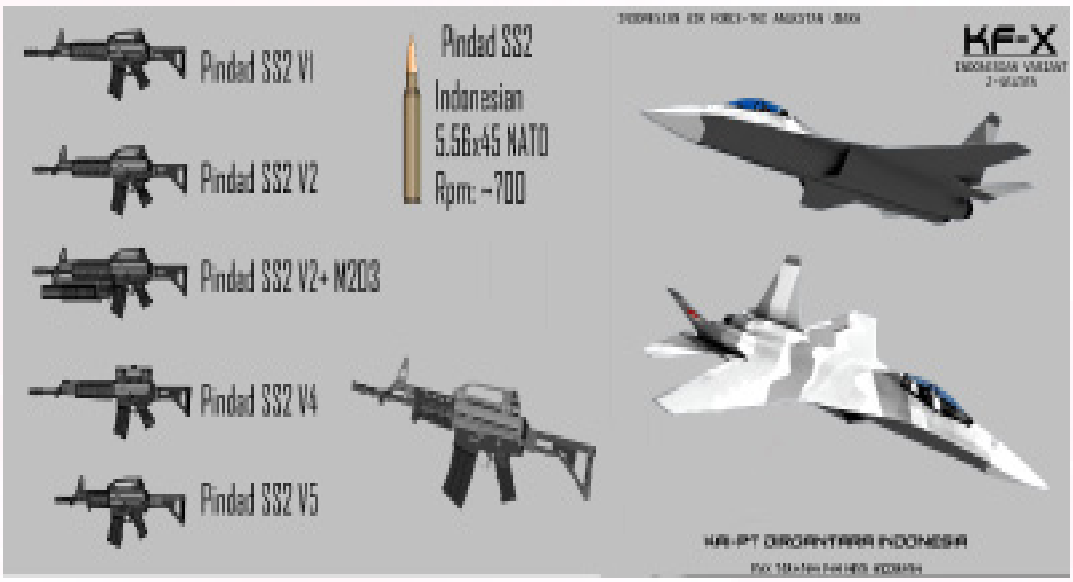

SUMBER : GOOGLE

4. PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA

4.1 UMUM

Penyelenggaraan strategi pertahanan negara dan perwujudan sasaran penyelenggaraan pertahanan negara memerlukan sarana serta prasarana yang meliputi kemampuan dan kekuatan pertahanan negara. Kekuatan dan kemampuan yang tercermin dalam Komponen Utama dan Unsur Utama sebagai alat untuk mencapai tujuan pertahanan negara. Tanpa kedua alat tersebut, tujuan pertahanan negara tidak akan tercapai. Tantangan ke depan bagaimana agar kekuatan dan kemampuan kedua alat tersebut dapat dimanfaatkan secara terintegrasi, saling mendukung, memberikan kedalaman untuk menghadapi setiap bentuk ancaman.

Terdukungnya strategi pertahanan negara sangat ditentukan oleh kemampuan pertahanan negara. Kemampuan pertahanan negara hanya dapat terwujud melalui suatu usaha pembinaan yang diselenggarakan dengan pola pembinaan yang dirancang secara jelas disertai dengan prinsip-prinsip dan sasaran pembinaan.

4.2 POKOK-POKOK PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA

Pada masa damai, pembinaan kemampuan pertahanan negara diarahkan untuk mewujudkan daya tangkal nasional, baik secara militer maupun nirmiliter. Pada masa perang, pembinaan kemampuan pertahanan negara diarahkan untuk mendinamisasi segenap sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan untuk mendukung keberlanjutan perang sampai peperangan dapat dimenangkan. Pada masa pasca perang, pembinaan kemampuan pertahanan negara diarahkan untuk mengembalikan kemampuan pertahanan yang terkena kerusakan atau dampak perang.

4.2.1 PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN MILITER

Pembinaan kemampuan pertahanan militer dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan TNI, yang diwujudkan dalam pembangunan postur TNI. Postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan negara yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2029. Perwujudan pembangunan postur TNI ditentukan oleh komitmen negara untuk mengalokasikan anggaran pertahanan dalam skema anggaran yang mampu menjamin kesinambungan rencana pembangunan pertahanan jangka panjang.

Pembinaan kemampuan pertahanan militer dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan yang mencakup penetapan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, perumusan kebijakan umum penggunaan kekuatan TNI, penetapan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi, dan industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI. Lingkup kewenangan pembinaan TNI mencakup pembinaan profesi TNI, pembinaan kekuatan TNI, pemeliharaan kesiapsiagaan operasional, serta pemenuhan kebutuhan TNI dengan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan.

SASARAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN MILITER

Pembinaan kemampuan pertahanan militer diarahkan untuk membina Komponen Utama pertahanan negara, yakni TNI yang profesional, berdaya juang tinggi, militan, dan memiliki kemampuan yang handal dalam menjalankan fungsinya sebagai penangkal, penindak, dan pemulih NKRI.

Pembinaan kemampuan pertahanan TNI dilaksanakan melalui pola Tri Matra Terpadu yang saling mengisi dan saling memperkuat. Sebagai Komponen Utama, sasaran pembinaan kemampuan TNI adalah untuk memiliki kemampuan intelijen, pertahanan, kemampuan dukungan, dan kemampuan pemberdayaan wilayah.

KEMAMPUAN INTELIJEN

Kemampuan intelijen mencakup kemampuan intelijen strategis dan kemampuan intelijen pertempuran. Kemampuan intelijen strategis mencakup kemampuan sebagai berikut.

SUMBER : GOOGLE

Pertama, kemampuan menganalisis perkembangan lingkungan strategis dan konteks strategis, termasuk perkembangan situasi dalam negeri yang diperlukan dalam memetakan gejala, potensi ancaman atau ancaman nyata yang membahayakan atau mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. *Kedua*, kemampuan melaksanakan penyelidikan, penginderaan, dan pendeteksian dini terhadap setiap gejala atau kemungkinan ancaman yang dapat membahayakan atau mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. *Ketiga,* kemampuan melaksanakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, perang urat saraf, penyesatan, dan perang informasi. *Keempat,* kemampuan melaksanakan kegiatan kontra-intelijen, lawan spionase, lawan infiltrasi, serta lawan sabotase.

Kemampuan intelijen pertempuran mencakup hal sebagai berikut. *Pertama*, kemampuan menganalisis faktor-faktor militer dari cuaca, medan, dan musuh bagi kepentingan pertempuran. *Kedua,* kemampuan melaksanakan penyelidikan, penginderaan, dan pendeteksian dini terhadap setiap perkembangan kegiatan musuh bagi kepentingan strategi dan taktik pertempuran. *Ketiga,* kemampuan melaksanakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, perang urat saraf, penyesatan, dan perang informasi bagi kepentingan pertempuran. *Keempat,* kemampuan melaksanakan kegiatan kontra-intelijen, lawan spionase, lawan infiltrasi, serta lawan sabotase bagi kepentingan pertempuran.

KEMAMPUAN PERTAHANAN

Kemampuan pertahanan mencakupi pertahanan udara nasional, pemukul strategis, pernika, dan pertahanan siber. Kemampuan pertahanan udara nasional dikembangkan dengan melaksanakan pendeteksian, pengamatan, pengintaian, dan perlindungan terhadap seluruh wilayah udara nasional. Kemampuan ini diselenggarakan oleh Kohanudnas dan unsur-unsur pertahanan udara dengan memaksimalkan sistem senjata pertahanan udara yang digelar di tiap matra. Kemampuan pemukul strategis disiapkan dan diselenggarakan oleh satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI serta kekuatan pemukul laut dan pemukul udara strategis. Kemampuan peperangan elektronika (Pernika) disiapkan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI, yang meliputi alat peralatan Pernika, sumber daya manusia yang mengawaki, serta pendukung lainnya.

SUMBER : GOOGLE

Kemampuan siber dikembangkan untuk memastikan dunia siber yang aman bagi keamanan nasional yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan siber terintegrasi dan bersinergi dengan semua instrumen kekuatan nasional lainnya untuk mengurangi risiko yang timbul dari serangan di ruang siber, sehingga dijalin kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan keamanan nasional. Kemampuan siber terkait dengan strategi Pertahanan Siber Nasional untuk menjamin ketahanan informasi dan sistem informasi nasional, yang menyangkut pembinaan aset dan infrastruktur strategis nasional beserta sistem pendukungnya, sehingga dapat meniadakan atau meminimalisasi ancaman siber terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

Termasuk dalam kemampuan pertahanan, pertahanan militer mampu mewujudkan keamanan nasional yang mencakupi kemampuan personel serta dukungan Alutsista dalam menjamin keamanan nasional dan keselamatan bangsa serta keamanan internal TNI dari segi personel, kesatuan, instalasi, serta sarana dan prasarana dari segala bentuk ancaman.

Kemampuan menjamin keamanan nasional dan keselamatan bangsa dijabarkan ke dalam; *Pertama*, kemampuan mengamati dan mengamankan wilayah udara, laut, serta wilayah daratan, dan menempatkan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan sebagai daerah yang mendapat prioritas; *Kedua*, kemampuan penegakan hukum di laut dan udara nasional untuk mencegah dan mengatasi setiap pelanggaran dan ancaman yang membahayakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional secara keseluruhan; dan *Ketiga*, kemampuan untuk mengatasi gerakan separatis, terorisme, spionase, pemberontakan bersenjata, insurjensi, perompakan, pembajakan, konflik komunal, dan gangguan keamanan lainnya yang penanganannya dilakukan melalui OMSP.

KEMAMPUAN DUKUNGAN

Kemampuan dukungan mencakup: *Pertama,* bantuan kemanusiaan dalam mengatasi dampak bencana alam. *Kedua,* kemampuan bantuan terhadap otoritas sipil dalam mengatasi permasalahan sosial dan bantuan lain dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat. *Ketiga,* kemampuan dukungan untuk membantu fungsi pertahanan nirmiliter dalam rangka penyediaan logistik pertahanan, penguatan diplomasi, survei dan pemetaan wilayah negara, penataan ruang nasional, kegiatan bela negara, serta penelitian maupun pengembangan teknologi dan industri nasional untuk pertahanan.

Keempat, kemampuan diplomasi militer, operasional (termasuk operasi perlindungan dan penyelamatan WNI di luar negeri), kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia atau tugas kemanusiaan pada lingkup internasional dan lingkup regional. *Kelima*, kemampuan memaksimalkan K4IPP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Informasi, Pengamatan, dan Pengintaian) dalam rangka mewujudkan *stricking force* dan *high mobility* kekuatan militer. *Keenam,* Kemampuan administrasi dibina dan dikelola secara proporsional dan professional melalui peningkatan dukungan anggaran, pemeliharaan dan perawatan, sarana dan prasarana, serta dukungan Bahan Minyak Pelumas (BMP).

KEMAMPUAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN

Pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan salah satu fungsi pemerintah yang harus dipersiapkan secara dini. Kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan mencakup penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan, penyelenggaraan pendidikan dasar kemiliteran, serta pemberdayaan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan meliputi wilayah negara beserta kekuatan pendukungnya untuk diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan. Pemberdayaan wilayah diwujudkan melalui upaya penyiapan wilayah untuk kepentingan pertahanan. Pemberdayaan wilayah pertahanan juga mencakup upaya untuk mendukung pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan pulau-pulau kecil terluar. Pendidikan dasar kemiliteran secara sukarela bagi warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara dan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemberdayaan wilayah pertahanan, tugas militer besifat memberi bantuan kepada pemerintah.

KEMAMPUAN DIPLOMASI PERTAHANAN

Diplomasi pertahanan dilaksanakan untuk memperoleh dukungan dan atau mempengaruhi kebijakan posisi dan sikap pemerintah negara lain yang terkait dengan masalah pertahanan negara. Diplomasi pertahanan merupakan bagian dari kebijakan diplomasi total. Diplomasi total melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder)* untuk berperan aktif, karena pada hakikatnya diplomasi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa.

Pemangku kepentingan (*stakeholder)* dalam melaksanakan diplomasi pertahanan di *backup oleh* Kementerian Pertahanan. Memperkuat dan mengembangkan kemampuan diplomasi dilakukan dengan mengintegrasikan perencanaan, penyusunan, dan penggunaan kekuatan militer dan nirmiliter.

Diplomasi pertahanan dalam diplomasi total merupakan diplomasi yang dilaksanakan oleh TNI dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Internasional. Implementasi dari diplomasi militer TNI yaitu : *pertama* pengiriman kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB sebagai bentuk diplomasi soft power. *Kedua* membangun kekuatan militer sehingga disegani dan didengar dalam setiap hubungan internasional sebagai bentuk diplomasi pertahanan *hard power.*

4.2.2 PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NIRMILITER

Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di lingkungan masing-masing yang dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan. Lingkup pembinaan yang dikoordinasikan mencakup aspek bela negara, penyiapan sumber daya nasional untuk pertahanan, serta kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara di bidangnya. Dalam rangka keikutsertaan warga negara dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara, Kementerian/ Lembaga menyelenggarakan fungsi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan bela negara.

SUMBER : GOOGLE

Dalam rangka pembentukan komponen pertahanan negara, Kementerian/Lembaga memiliki peran dalam penyiapan sumber daya nasional untuk dimobilisasi menjadi Komponen Cadangan dan pemberdayaan sumber daya nasional untuk menjadi Komponen Pendukung. Dalam bidang pertahanan sipil, Kementerian/Lembaga menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk mengatasi ancaman nirmiliter sesuai dengan lingkup fungsinya. Tanggung jawab Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan teraktualisasi dalam perumusan kebijakan di bidangnya yang berdimensi pertahanan, baik untuk menghadapi ancaman militer maupun dalam kerangka pertahanan sipil.

Pembinaan kemampuan bersifat nasional yang mencerminkan kesemestaan bertumpu pada sumber daya manusia sebagai pusat kekuatan pertahanan negara, didukung oleh sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial dalam pengejawantahan sistem pertahanan rakyat semesta yang tanggap, tanggon dan trengginas serta memiliki lima kemampuan bela negara. Pembinaan terhadap sasaran kemampuan pertahanan nirmiliter dilakukan untuk mengoptimalkan perwujudan kemampuan pertahanan nirmiliter, terdiri dari kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan ilpengtek, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter.

SASARAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NIRMILITER

Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter diarahkan pada sasaran tumbuhnya peran serta rakyat sebagai unsur kekuatan bangsa dalam pertahanan negara sesuai profesi, pengetahuan, dan keahlian, serta kecerdasan. Pembinaan pertahanan nirmiliter pada dasarnya diintegrasikan dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter, selain untuk membangun daya tangkal bangsa terhadap setiap ancaman, juga untuk mewujudkan daya tahan bangsa dari segala aspek kehidupan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan khususnya menghadapi ancaman nirmiliter.

KEMAMPUAN KEWASPADAAN DINI

Kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergitas penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kondisi kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk memprediksi dampak perkembangan dan dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat menjadi ancaman/gangguan bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa yang berdasarkan UUD 1945.

KEMAMPUAN BELA NEGARA

Kemampuan bela negara dikembangkan untuk menjamin kelang-sungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Bela Negara merupakan sikap dan perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

SUMBER : GOOGLE

Kemampuan bela negara itu hakikatnya kesadaran dan kesediaan berbakti pada negara serta kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena itu setiap warga negara diarahkan untuk memiliki unsur dasar bela negara, berupa: cinta tanah air; kesadaran berbangsa dan bernegara; yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; serta memiliki kemampuan awal bela negara.

KEMAMPUAN DIPLOMASI

Kemampuan diplomasi dikembangkan dengan menerapkan manajemen yang lebih baik untuk mengimplementasikan kebijakan politik negara. Usaha dan kegiatan diplomasi sebagai salah satu kemampuan pertahanan nirmiliter dioptimalkan untuk mendukung upaya pertahanan negara. Usaha dan kegiatan diplomasi diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara, serta tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing. Usaha diplomasi juga diarahkan sebagai lapis pertahanan terdepan dalam menyelesaikan bentuk-bentuk perselisihan atau konflik dengan negara lain.

KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)

Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dioptimalkan untuk mendukung pertahanan nirmiliter. Iptek mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan yang berpotensi memberikan dukungan besar bagi kesejahteraan bangsa, keamanan, kelestarian lingkungan hidup, pelestarian budaya bangsa dan taraf hidup manusia. Kemajuan Iptek yang pesat dan bersifat universal merupakan peluang bagi pembangunan kemampuan pertahanan negara, terlebih dalam mempersiapkan pertahanan nirmiliter yang melibatkan disiplin ilmu secara integral. Kemampuan penguasaan teknologi bangsa Indonesia secara umum akan meningkatkan pertahanan nirmiliter. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan teknologi kedirgantaraan, kelautan dan bahkan keantariksaan secara terbatas.

Penguasaan teknologi juga dapat dilihat dari kemampuan membuat berbagai perangkat yang berteknologi tinggi guna mendukung pertahanan siber. Termasuk dalam penguasaan teknologi ini, di bidang biologi untuk membangun *biodefence*.

KEMAMPUAN EKONOMI

Kemampuan ekonomi dikembangkan sampai pada tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, berdaya saing, dan mampu menyejahterakan rakyat secara keseluruhan. Dalam kondisi damai, usaha-usaha ekonomi harus dapat mewujudkan kemandirian serta menjamin kepastian dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat secara berkesinambungan, yang pada gilirannya menjadi penopang kepentingan pertahanan. Dalam kondisi darurat, termasuk keadaan perang, kemampuan perekonomian nasional harus dapat menjamin keberlangsungan upaya pertahanan, termasuk menjamin kebutuhan logistik untuk menghadapi perang berlarut dan mampu *survive* apabila diembargo atau diblokade secara ekonomi.

KEMAMPUAN SOSIAL

Kemampuan sosial diaktualisasikan dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aktualisasi ini diarahkan untuk menjunjung tinggi kerukunan dan hidup berdampingan secara damai, tanpa mempersoalkan perbedaan ras, agama, suku, dan golongan serta kemampuan penyelamatan warga negara dari bencana dan melakukan bantuan kemanusiaan. Perwujudan kemampuan sosial bangsa Indonesia dikembangkan melalui pendidikan, kesehatan, penanganan bencana dan ketaatan terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut menjadi modalitas yang memberikan kontribusi bagi pertahanan negara, yakni menentukan pembentukan masyarakat yang cerdas, sehat, dan berkualitas. Selain itu, peran media massa, sistem komunikasi dan informasi publik dioptimalkan untuk mendukung implementasi kemampuan sosial dalam mendukung keberhasilan usaha-usaha pertahanan negara.

KEMAMPUAN MORAL

Kemampuan moral diaktualisasikan dalam semangat, motivasi, sikap, dan tata laku untuk menumbuhkembangkan nasionalisme, patriotisme, dan heroisme dalam rangka membela dan mempertahankan Indonesia dengan segala kepentingannya. Kemampuan moral juga mencakupi komitmen bangsa Indonesia untuk bangga sebagai bangsa Indonesia, percaya akan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik, setia (loyal) kepada negara dan pemerintah, memegang teguh nilai-nilai kebangsaan yang terangkum dalam Pancasila, serta menegakan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hukum dan hak asasi manusia, serta keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

KEMAMPUAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara mencakup kemampuan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana serta wilayah pertahanan untuk kepentingan kesejahteraan sekaligus dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan. Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di seluruh wilayah disinkronkan secara proporsional dan seimbang. Pemberdayaan wilayah untuk kepentingan pertahanan meliputi penataan ruang, alat, dan kondisi juang yang memadukan kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan. Dalam pemberdayaan wilayah pertahanan untuk mendukung kepentingan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemberdayaan wilayah pertahanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dikelola dengan memperhatikan hak masyarakat dan kepentingan umum.

PK-XNA

5. PENGELOLAAN RISIKO

5.1 UMUM

Pengelolaan risiko dalam strategi ini diartikan sebagai suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidak pastian yang berkaitan dengan ancaman dan hambatan. Implementasi strategi pertahanan negara yang melibatkan semua komponen bangsa dalam pertahanan semesta diperlukan koordinasi dan sinkronisasi sistem yang tidak mudah. Rencana yang telah disusun belum tentu dapat diwujudkan. Pengimplementasian Strategi Pertahanan Negara akan memerlukan serangkaian penyesuaian untuk menghadapi kemungkinan kemungkinan risiko yang pasti akan dialami. Dengan manajemen pengerahan sumber daya nasional yang terbatas, Strategi Pertahanan Negara ini perlu mengantisipasi, mengurangi, dan merespon risiko.

Dari kebijakan yang telah tertuang di atas kemungkinan risiko yang akan akan dihadapi antara lain sebagai berikut: Risiko Operasional ; Risiko Ancaman Masa Depan ; Risiko Kelembagaan dan Risiko Pengelolaan Kekuatan

5.2 RISIKO OPERASIONAL

Pertahanan negara yang ideal dilaksanakan dengan mengintegrasikan dan menyinergikan segenap kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter.

Pertahanan militer memerlukan dukungan interoperabilitas agar dapat bersinergi. Pada pertahanan militer, upaya mengintegrasikan dan menyinergikan kekuatan darat, kekuatan laut dan kekuatan udara yang dimiliki oleh TNI dilaksanakan dengan prinsip Tri Matra Terpadu. Implementasi dari prinsip Tri Matra Terpadu antara lain adanya asas interoperabilitas diantara seluruh kekuatan TNI dalam doktrin, strategi, operasi dan latihan, Alutsista, serta sistem logistik dan sistem komunikasi. Apabila interoperabilitas tidak dapat diimplementasikan, maka akan berpengaruh pada efektifitas pertahanan militer. Untuk mengatasi hal yang demikian diperlukan protap-protap pada tataran operasional.

Pertahanan nirmiliter memerlukan dukungan kesamaan persepsi. Pada pertahanan nirmiliter, selain harus bersinergi dengan kekuatan pertahanan militer, diperlukan kesamaan persepsi antara Kementerian/Lembaga terkait tentang tugas, kewajiban, dan peran masing-masing dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Apabila tidak ada kesamaan persepsi diantara Kementerian/Lembaga maka akan sulit menciptakan sinergitas diantara kekuatan pertahanan nirmiliter. Kesamaan persepsi juga diperlukan untuk membangun dan memelihara sinergitas antara kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan nirmiliter.

Kegagalan membangun pertahanan negara yang terintegrasi dan bersinergi akan berisiko gagalnya implementasi Strategi Pertahanan Negara yang menekankan pentingnya sifat kesemestaan. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur untuk menciptakan kesamaan persepsi antara kementerian dan lembaga serta TNI.

5.3 RISIKO ANCAMAN MASA DEPAN

Dinamika perkembangan lingkungan strategis dan konteks strategis yang cepat berubah, penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi berisiko memunculkan ancaman baru. Tantangan dan ancaman ke depan yang belum teridentifikasi dan mungkin terjadi dapat berdampak kepada kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa perlu diantisipasi dengan menerapkan strategi pertahanan yang tepat, fleksibel, dan adaptif.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat dan signifikan merupakan salah satu pemicu (*trigger*) yang perlu diantisipasi dan diikuti dengan seksama. Kemajuan teknologi informasi, teknologi robotik, dan nano-teknologi, selain memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia, juga akan berdampak pada kemungkinan munculnya berbagai ancaman baru.

Beberapa bentuk ancaman yang mungkin dapat terjadi antara lain ancaman siber (*cyber threat*), ancaman kimia, biologi, nuklir dan bahan peledak (CBRN-E). Ancaman yang berbasis penggunaan *beam weapons* berpeluru tidak kasat mata, *High energy liquid laser* yang dapat menembus sararan tebal, *Space based weapon* senjata ruang angkasa, *Hypersonic aircraft* yang memiliki kecepatan lima kali kecepatan suara, *Armed Unmanned Aerial Vehicle* pesawat tanpa awak yang dipersenjatai, XM-25 senjata komputer perorangan, *Metaflex* materi yang dapat mengkamuflasekan personel, *Free electron laser* (laser tembak elektron), *Railgun* senjata mesin berpelontar peluru berkecepatan tujuh kali kecepatan suara.

Bentuk ancaman perang hibrida *(hybrid war*) dan perang berbasis jaringan (*Network Centric Warfare*) dalam lima tahun ke depan juga akan menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan Strategi Pertahanan Negara.

5.4 RISIKO KELEMBAGAAN

Organisasi. Kelembagaan/institusi yang telah direkomendasikan untuk segera dibentuk dalam strategi pertahanan ini akan mempermudah implementasi Strategi Pertahanan Negara. Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) merupakan suatu kebutuhan untuk mengimplementasikan Strategi Pertahanan Negara khususnya Pertahanan Militer. Kogabwilhan merupakan pelaksana utama Strategi Militer sebagai implementasi Strategi Pertahanan Negara untuk menghadapi ancaman militer secara Tri Matra Terpadu pada tataran operasional. Kegagalan pembentukan Kogabwilhan dapat berdampak terhadap kemampuan dan gelar pertahanan militer untuk mengantisipasi ancaman militer.

Pertahanan nirmiliter memerlukan suatu institusi yang dapat mengkoordinasikan peran Kementerian/Lembaga dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan perlu memahami adanya ancaman dari aspek-aspek nonmiliter yang penanganannya memerlukan koordinasi dengan unsur lain kekuatan bangsa. Institusi yang memiliki kewenangan untuk menentukan Unsur Utama dan unsur lain dalam menangani ancaman nonmilter menjadi suatu yang penting untuk segera dibentuk. Ketiadaan institusi tersebut dalam kondisi menghadapi kontijensi ancaman nonmiliter akan berisiko kegagalan implementasi Strategi Pertahanan Negara.

Anggaran. Pertahanan negara akan kuat apabila alokasi anggaran dapat didukung di atas 2% PDB. Implementasi Strategi Pertahanan Negara akan tidak efektif atau terkendala apabil alokasi anggaran pertahanan negara kurang dari 2% PDB. Kekurangan anggaran akan berdampak pada penyiapan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman ke depan. Kementerian dan lembaga serta TNI memerlukan anggaran yang proporsional dalam rangka mengembangkan dan memelihara kekuatan dan kemampuan pertahanan.

Kegagalan pemenuhan alokasi anggaran akan menurunkan keseimbangan antara sasaran yang akan dicapai (*ends*), cara mencapai tujuan (*ways*), dan sumber daya yang dipergunakan untuk mencapai sasaran (*means*) sehingga berisiko gagalnya strategi.

Regulasi. Konsekuensi logis dengan menggunakan sistem pertahanan semesta adalah pelibatan seluruh kekuatan bangsa. Pengerahan elemen-elemen bangsa untuk terlibat dalam upaya pertahanan negara memerlukan regulasi. Regulasi yang diperlukan antara lain UU Keamanan Nasional, UU Komponen Cadangan, UU Komponen Pendukung, dan Peraturan tentang Tugas-tugas Perbantuan TNI. Apabila perangkat undang-undang dan peraturan tersebut tidak tersedia, implementasi Strategi Pertahanan Negara akan terkendala. Pemerintah dan DPR perlu memberikan prioritas untuk menyelesaikan Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan upaya pertahanan negara, agar supaya Strategi Pertahanan Negara dapat diimplementasikan dengan efektif.

5.5 RISIKO PENGELOLAAN KEKUATAN

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset yang paling penting dalam usaha pertahanan negara. Kekuatan pertahanan negara pada hakikatnya ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM yang didukung oleh kemajuan teknologi pertahanan. Kegagalan dalam mempersiapkan, melatih, memperlengkapi SDM pertahanan baik secara kualitas maupun kuantitas akan mempengaruhi kesiapan operasional pertahanan negara. SDM pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sama-sama harus terlatih dengan baik **(***well-trained*) diperlengkapi dengan baik (*well-equiped*) dan memiliki motivasi yang tinggi (*high-motivated*) agar memiliki kemampuan yang handal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam usaha pertahanan negara.

SDM yang tidak siap untuk menghadapi berbagai hakikat ancaman akan mempengaruhi implementasi Strategi Pertahanan Negara. Oleh karenanya, penyiapan SDM pertahanan yang professional, disertai pemberian peluang untuk kemajuan dan pengembangan profesionalisme menjadi faktor krusial untuk mengimplementasikan Strategi Pertahanan Negara.

6. PENUTUP

6.1 PEMBERLAKUAN

Strategi Pertahanan Negara ini adalah dokumen pemerintah di bidang pertahanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Strategi Pertahanan Negara berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, serta Lembaga Pemerintah di luar bidang Pertahanan dalam kerangka penyelenggaraan pertahanan negara.

6.2 PETUNJUK AKHIR

Strategi pertahanan negara digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, pembangunan Postur Pertahanan Negara, mengembangkan Doktrin Pertahanan Negara serta mengembangkan Strategi Pertahanan Militer dan Strategi Pertahanan Nirmiliter.

Strategi pertahanan negara menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Jakarta, 2014

Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro

Paraf :

1. Wamenhan : .....
2. Sekjen : .....
3. Dirjen Strahan : .....

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN
Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, JAKARTA